



RENSTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TAHUN 2018-2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga buku Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ini dapat diselesaikan.

Buku Renstra ini menyajikan informasi tentang penjabaran Misni Gubernur Provinsi DKI Jakarta ke dalam program kegiatan jangka menengah pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yakni *menjadikan Jakarta tempat wahanza aparatur negara yang berkarya , mengabdi dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas.*

Penyusunan Buku Renstra didasarkan pada analisa terhadap dinamika internal dan eksternal serta masukan dari seluruh bagian di sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tetap memperhatikan SIRPJMD yang telah disupervisi oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Buku ini menyajikan riwayat pencapaian kinerja tahun 2012-2017, visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, serta rencana pengembangan program yang telah dirumuskan.

Program pembangunan pemerintah kota harus dikembangkan berdasarkan perencanaan strategis yang lebih visioner dan berkelanjutan. Untuk itulah Renstra 2017-2022 ini perlu disusun sesuai dengan kondisi terkini dan proyeksi masa depan yang menjadi tanggung jawab bersama. Semoga rencana strategis ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Wali kota Kota Administrasi Jakarta Barat

H. Rustam Effendi
NIP 196010131983121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan program pembangunan wilayah lima tahunan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistik untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

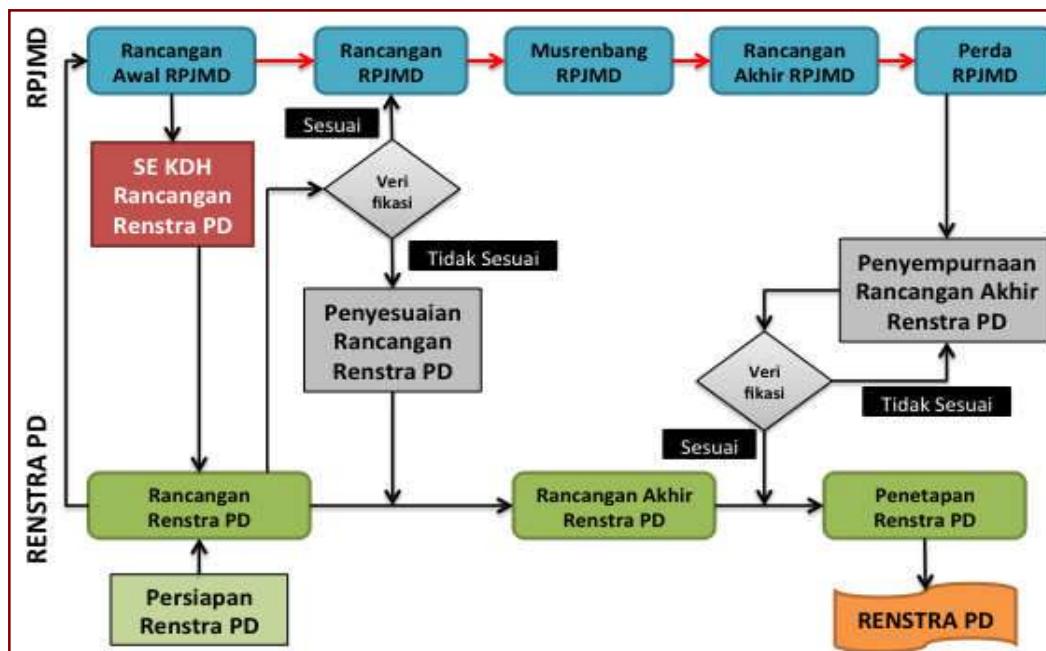
Selaras dengan itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Administrasi Jakarta Barat wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat disusun berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.

Rencana strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Barat dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sedangkan bagan alir penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat
Periode 2018-2022

Renstra ini sangatlah penting dalam memandu pelaksanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan disusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2018-2022 maka seluruh entitas Kota Administrasi Jakarta Barat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur) dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah, sehingga Kota Administrasi Jakarta Barat dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2018-2022.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Pelaksanaannya Penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022, mengacu pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;
21. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang pelimpahan Wewenang Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Gubernur kepada Kota Administrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah:

1. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat;

2. Sebagai penjabaran implementasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta;
3. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sebagai acuan dalam memberikan arah mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Barat; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sumberdaya Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaah kebijakan kewilayahan Jakarta Barat, serta penentuan isu-isu strategis.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Barat Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

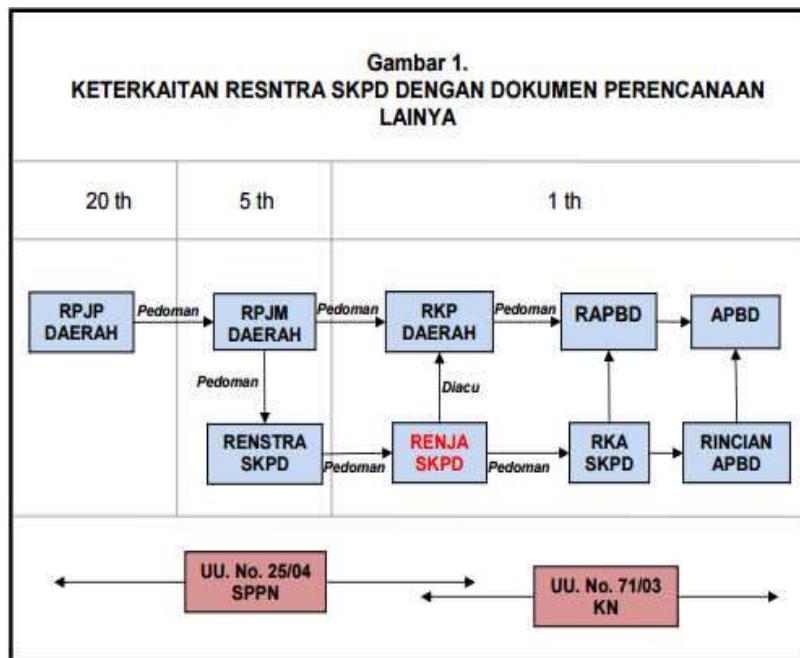
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2018-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Berdasarkan gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki visi:

*“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai
Kota Jasa yang nyaman dan Sejahtera”*

Sedangkan Misi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah:

1. Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebuah kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan Masyarakat dgn mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Barat berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam kedudukannya sebagai unsur pembantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Jakarta Barat, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Barat,

membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi;

- q. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. koperasi, usaha kecil, dan menengah.

2.1.3. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Sekretariat Kota, terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pelayanan Hukum;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM.
 - c) Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Kepegawaian;

- 2) Subbagian Tatalaksana; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan;
 - 2) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan; dan
 - 3) Subbagian Perhubungan serta Perindustrian dan Energi.
 - b) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sarana dan Prasarana Kota;
 - 2) Subbagian Tata Ruang dan Pertanahan; dan
 - 3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Sosial, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Subbagian Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip;
 - 3) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
 - d. Kecamatan, terdiri dari :
 1. Camat;
 2. Wakil Camat;
 3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 7. Kelurahan, terdiri dari :
 - a) Lurah;
 - b) Wakil Lurah;
 - c) Sekretariat Kelurahan;
 - d) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

Walikota mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- b. Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintah Kota Administrasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan fungsi Perangkat Daerah ditingkat Kota Administrasi;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. Mengoordinasikan, mengomando, mengendalikan dan mengevaluasi penanggulangan bencana ditingkat Kota Administrasi;
- g. Mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;

- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan Kota Administrasi;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Walikota mempunyai tugas:

- a. Membantu walikota dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota;
- c. Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota.
- e. Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Walikota
- f. Sekretariat Kota, menyelenggarakan fungsi :
- g. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- h. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- i. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- j. Fasilitasi pemantauan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat SKPD di tingkat Kota Administrasi;
- k. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasional tugas dan fungsi perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi;
- l. Pengoordinasian dan/atau perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kota Administrasi;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Dewan Kota;
- n. Pelaksanaan pembinaan kecamatan dan kelurahan;

- o. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran kota administrasi;
- p. Pembinaan dan pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- r. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- s. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
- t. Pelaksanaan publikasi kegiatan upacara dan pengaturan acara;
- u. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana;
- v. Pengordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas;
- w. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Kota.

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tata pemerintahan, hukum ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta kepegawaian;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan kewilayahan;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah bidang pemerintahan tingkat Kota Administrasi;
- d. Memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang pemerintahan tingkat Kota Administrasi;
- e. Melaksanakan fasilitasi pemantauan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat SKPD bidang pemerintahan, kecamatan serta kelurahan;

- f. Memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi dan membina kecamatan serta kelurahan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan dewan kota;
- h. Mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah kota administrasi;

Perangkat SKPD bidang pemerintahan tingkat Kota Administrasi meliputi:

1. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
2. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
3. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
4. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
5. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
7. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi;

Asisten Pemerintahan terdiri dari:

1. Bagian Tata Pemerintahan yang memiliki fungsi :
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. Pengordinasian pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab

- ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
- f. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang pemerintahan tingkat kota administrasi;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Kecamatan dan Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - i. Fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah kota administrasi;
 - j. Fasilitasi kegiatan dewan kota;
 - k. Fasilitasi kegiatan asosiasi pemerintah kota;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Administrasi;
 - m. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kota administrasi;
 - n. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis kota administrasi;
 - o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Hukum yang memiliki fungsi:
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pengkajian dan analisis hukum;
 - d. Penghimpunan dan pendokumentasian produk hukum;
 - e. Penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyiapan bahan pertimbangan hukum dan bantuan hukum kepada aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi;
 - g. Pengoordinasian, penanganan sengketa hukum terkait aset;

- h. Penanganan pelayanan sengketa hukum non aset;
 - i. Pengoordinasian perumusan keputusan Walikota;
 - j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum;
3. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang memiliki fungsi:
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran kota administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penghimpunan, penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, kebijakan operasional pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, koordinasi pelayanan publik, komunikasi, informatika dan statistik di wilayah Kota Administrasi;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, koordinasi pelayanan publik, komunikasi, informatika dan statistik di wilayah Kota Administrasi;
 - e. Penataan ruang Kantor di Wilayah Kota Administrasi;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan kegiatan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi;
 - g. Pengelolaan kepegawaian Kota Administrasi;
 - h. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - i. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan Key Performance Indicator Kota Administrasi;
 - j. Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi;
 - k. Pengumpulan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi;
 - l. Pengelolaan perpustakaan kedinasan Kota Administrasi;
 - m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan tugas membantu Sekretaris Kota dalam:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi bagian perekonomian dan pembangunan Kota Administrasi;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi, pangan. Kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, bina marga, tata air, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, kehutanan, pertamanan, pemakaman, lingkungan hidup, kebersihan dan perhubungan;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah bidang perekonomian dan bidang pembangunan tingkat Kota Administrasi;
- d. Memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang perekonomian dan bidang pembangunan tingkat Kota Administrasi;
- e. Mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kota Administrasi;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan dan penertiban bangunan;
- g. Melaksanakan pengoordinasian penugasan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan SKPD/UKPD yang melaksanakan urusan penunjang bidang aset;
- h. Memfasilitasi pemantauan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat SKPD bidang perekonomian dan pembangunan pada Kota Administrasi;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penghimpunan, penyiapan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional bidan gpariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, perhubungan, perindustrian dan energy;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional bidan gpariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, perhubungan, perindustrian dan energi;
 - e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional bidan gpariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, perhubungan, perindustrian dan energi;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Perindustrian dan Energi, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Suku Dinas Perhubungan;
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian.
2. Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;

- c. Penhimpunan, penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan operasional pembangunan prasarana kota, sarana kota, perumahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah, sarana transportasi dan kelengkapan kota, penataan kota, pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pembangunan prasarana kota, sarana kota, perumahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah, sarana transportasi dan kelengkapan kota, penataan kota, pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Suku Dinas Kehutanan, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Sumber Daya Air;
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi bagian Umum dan Protokol, Bagian Keuangan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- c. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- d. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Kota Administrasi;

- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional sosial, pendidikan dasar, pendidikan menengah, kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana serta perpustakaan dan arsip;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Melaksanakan fasilitasi pemantauan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat SKPD bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. Memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang Kesejahteraan Rakyat tingkat Kota Administrasi;

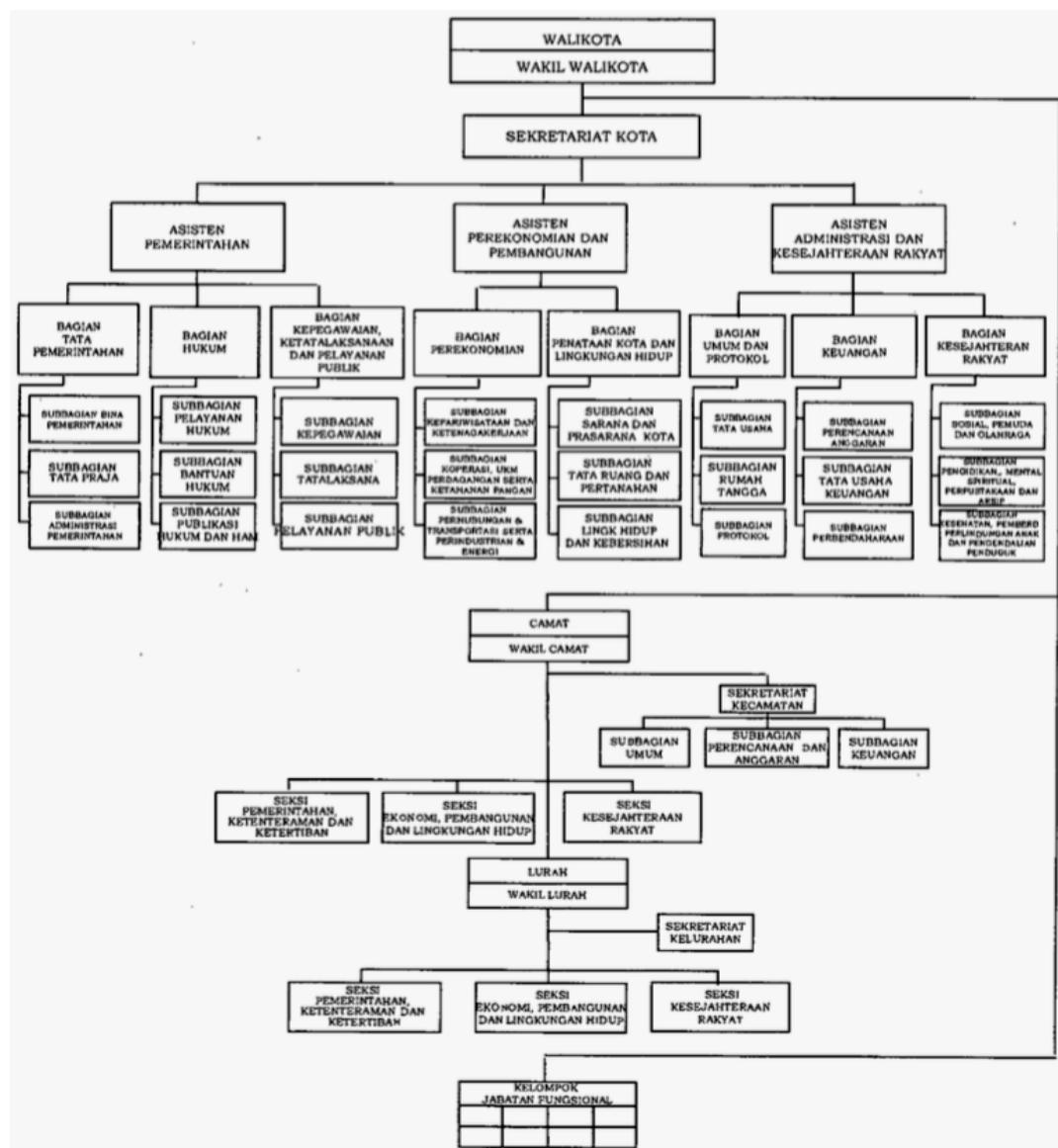
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- 1. Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran kota administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran kota administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan antara lain penerimaan, pencatatan, pentaklikan, pengetikan, penomoran dan pendistribusian naskah dinas;
 - d. Pengelolaan kearsipan meliputi penyimpanan, pemeliharaan, penelusuran dan penghapusan arsip;
 - e. Pengelolaan informasi dan dokumentasi Kota Administrasi;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap unit kerja di wilayah kota administrasi berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan/peralatan/inventaris kerja/kantor;

- h. Penyusunan perencanaan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor kota administrasi termasuk rumah dinas Walikota;
 - i. Pelaksanaan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor kota administrasi termasuk rumah dinas Walikota;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan/peralatan/inventaris kerja/kantor;
 - k. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan kantor kota administrasi termasuk rumah dinas Walikota;
 - l. Pelaksanaan koordinasi penghapusan barang;
 - m. Penyerahan pencatatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan, peralatan/inventaris kerja/kantor kepada Bagian Keuangan untuk dibukukan;
 - n. Pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu Kota Administrasi;
 - o. Pelaksanaan kegiatan penjamuan tamu Walikota;
 - p. Pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota;
 - q. Pelaksanaan koordinasi pengaturan acara pimpinan kota administrasi;
 - r. Fasilitasi penyelenggaraan acara Kota Administrasi.
 - s. Pengelolaan pengamanan dalam kompleks Kantor Walikota;
 - t. Penghimpunan, analisis dan pengajuan kebutuhan/penghapusan peralatan/inventaris Kota Administrasi;
 - u. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian Umum dan Protokol.
2. Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran kota administrasi sesuai lingkup tugasnya;

- c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kota Administrasi;
 - f. Pemrosesan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. Penelitian dan pemrosesan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - h. Penelitian/pengujian kelengkapan persyaratan tagihan belanja Kota Administrasi;
 - i. Penghimpunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan Kota Administrasi;
 - j. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Kota Administrasi;
 - k. Pelaksanaan evaluasi nilai dan manfaat aset Kota Administrasi;
 - l. Pembukuan dan penyusunan akuntansi aset Kota Administrasi;
 - m. Penelitian/pengujian surat pertanggungjawaban keuangan Kota Administrasi;
 - n. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan kinerja Kota Administrasi;
 - o. Pengelolaan teknologi informasi keuangan Kota Administrasi;
 - p. Penyimpanan, pemeliharaan dan penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan Kota Administrasi;
 - q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Keuangan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi seuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;

- c. Penghimpunan, penyiapan dan penyusunan bahan penyusunan kebijakan operasional sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana, pendidikan olahraga dan pemuda serta perpustakaan dan kearsipan dan mental spiritual;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana, pendidikan olahraga dan pemuda serta perpustakaan dan kearsipan dan mental spiritual;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip kota administrasi;
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

2.2. Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Banten. Jakarta Barat terkenal memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan penjajahan Belanda dan perjuangan rakyat Batavia, untuk itu hingga sekarang Jakarta Barat terkenal dengan berbagai peninggalan masa kolonial Belanda seperti kawasan kota tua,

kawasan pecinan (glodok) dan sejumlah masjid tua, serta benteng-benteng peninggalan Belanda.

Kelahiran Jakarta Barat sebagai wilayah kota bagian dari provinsi DKI Jakarta ditandai dengan lahirnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Ib.3/I/I/1966 tanggal 12 Agustus 1966 tentang Pembentukan Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah DKI Jakarta dimana penataan wilayah administratif Pemerintah Kotapraja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya Wilayah Administrasi Jakarta Barat.

1) Keadaan Wilayah



Gambar 2.2. Peta Kota Administrasi Jakarta Barat

Secara geologis, permukaan tanah Jakarta Barat merupakan dataran rendah yang terletak sekitar 7 m di atas permukaan laut. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayahnya 129,54 km², serta mempunyai 23 sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air, perikanan dan bisnis perkotaan, terdiri dari 8 Kecamatan, 56 Kelurahan, 585 RW dan 6.484 RT.

Secara administratif Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur	:	Kota Adm. Jakarta Utara dan Kota Adm. Jakarta Pusat
Sebelah Utara	:	Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Adm. Jakarta Utara
Sebelah Selatan	:	Kota Adm. Jakarta Selatan dan Kota Tangerang
Sebelah Barat	:	Banten (Kota Tangerang)

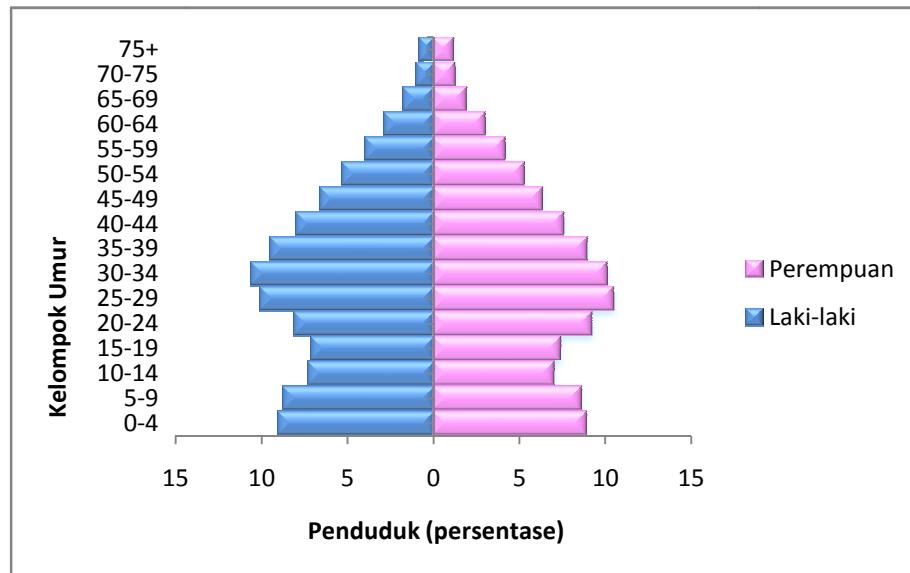
Kondisi geografis Kota Administrasi Jakarta Barat terletak diantara $106^{\circ} 22' 42''$ BT sampai dengan $106^{\circ} 58' 18''$ dan $5^{\circ} 19' 12''$ sampai dengan $6^{\circ} 23' 54''$ LS (sumber : BPS). Sesuai dengan sejarah geologisnya, wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat terbentang pada dataran alluvial pada hilir sungai Ciliwung, dengan topografi rata. Kedalaman akifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air) air bumi (groundwater) relatif dangkal, yang menurut berbagai penelitian telah terintrusi oleh air laut, yang terasa terutama pada musim kemarau. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagian besar terdiri dari tanah daratan yang relatif landai dengan belahan kontur yang tinggi di sepanjang Kali Banjir Kanal, yang memungkinkan pertemuan pasang air laut dengan limpasan banjir permukaan sehingga wilayah ini cukup rawan banjir.

Adapun jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak ± 2.326.721 jiwa (Informasi Data Statistik Kependudukan, November 2018), kepadatan 17.961 jiwa/Km² dan pertumbuhan penduduk 1,36% (BPS, 2018).

2) Kependudukan

Kepadatan penduduk di kota Administrasi Jakarta Barat bulan November tahun 2018 mencapai 17.961 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tambora dengan kepadatan sebesar 44.548 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Kembangan sebesar 13.007 jiwa/km².

Adapun piramida penduduk Jakarta Barat Data Proyeksi Penduduk 2017, menurut jenis kelamin adalah:



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Jakarta Barat Data Proyeksi Penduduk 2017, menurut Jenis Kelamin (Persentase) (Sumber: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat).

Adapun jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat menurut jenis kelamin dan berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Jakarta Barat
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

No <i>District</i>	Kecamatan	Penduduk/ <i>Population</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
		Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Kembangan	136 299	133 457	269 756	102,13	
2. Kebon Jeruk	164 470	162 120	326 590	101,45	
3. Palmerah	109 373	106 246	215 619	102,94	
4. Grogol Petamburan	112 445	111 595	224 040	100,76	
5. Tambora	133 553	126 831	260 384	105,30	

6. Taman Sari	62 708	61 948	124 656	101,23
7. Cengkareng	261.138	251 860	512 998	103,68
8. Kalideres	199.520	193 158	392 678	103,29
Jakarta Barat	1.179.506	1 147 215	2 326 721	102,81
2016	1 175 328	1 141 853	2 317 181	102,93
2015	1 169 566	1 145 436	2 315 002	102,11
2014	1 162 134	1 112 548	2 274 682	104,46

Sumber : BPS tahun 2018

Dari tabel 2.1. diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Cengkareng sebanyak 512.998 orang disusul Kecamatan Kalideres 392.678 orang dan jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Tamansari dengan sebanyak 124.656 orang.

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tambora yakni $48.219/\text{Km}^2$, kemudian berikutnya di Kecamatan Palmerah dengan tingkat kepadatan penduduk $28.711/\text{Km}^2$, dan terendah di Kecamatan Kembangan sebesar $11.165/\text{Km}^2$.

Sementara itu jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Jakarta Barat
Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan**

No	Kecamatan <i>No District</i>	Luas Wilayah (Km ²) <i>Area (Km²)</i>	Jumlah Penduduk <i>Number of Population</i>	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kembangan	24,16	269 756	11.165
2.	Kebon Jeruk	17,98	326 590	18.164
3.	Palmerah	7,51	215 619	28.711
4.	Grogol	9,99	224 040	22.426

Petamburan				
5.	Tambora	5,40	260 384	48.219
6.	Taman Sari	7,73	124 656	16.126
7.	Cengkareng	26,54	512 998	19.329
8.	Kalideres	30,23	392 678	12.990
		Jakarta Barat 129,54	2 326 721	17 961
2016		129,54	2 317 181	17 888
2015		129,54	2 315 002	17 871
2014		129,54	2 274 682	17 560

Sumber : BPS tahun 2018

3) Sumber Daya Manusia Kota Administrasi Jakarta Barat

Dari tabel 2.3 dapat dilihat distribusi jumlah pegawai dilingkup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan jumlah pegawai terbanyak di Bagian Umum dan Protokol sebanyak 27 orang, disusul Bagian Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik sebanyak 17 orang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	UNIT	JUMLAH PEGAWAI
1	Walikota, Wakil Walikota, Sekko, Para Asisten	6
2	Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik	17
3	Bagian Hukum	13
4	Bagian Tata Pemerintahan	13
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15
6	Bagian Umum dan Protokol	26

NO	UNIT	JUMLAH PEGAWAI
7	Bagian Perekonomian	11
8	Bagian Keuangan	15
9	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	13
TOTAL		129

Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, 2017

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Barat didukung oleh sebanyak 856 pegawai yang tersebar kedalam tingkat sekretariat kota, kecamatan dan kelurahan sebagai berikut :

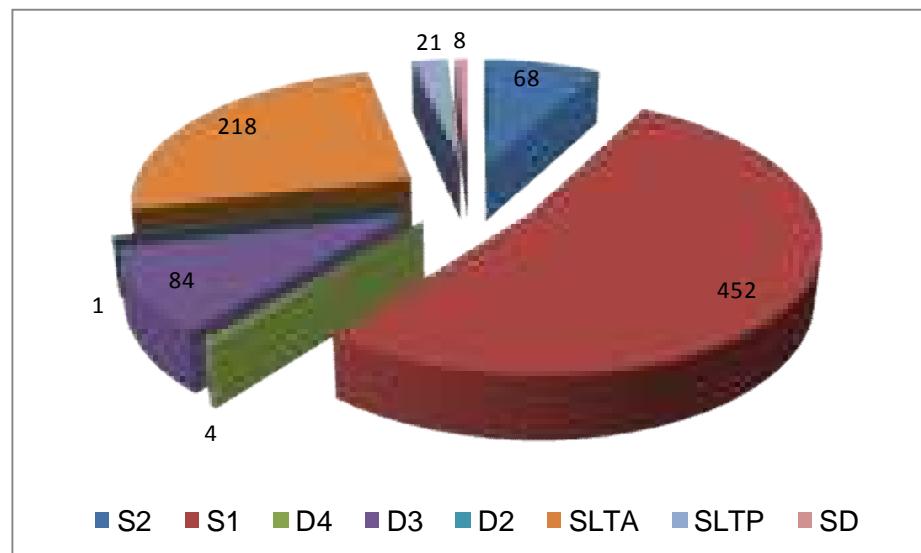
Tabel 2.4 Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja

NO	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	SETKO	JUMLAH
A	Eselon II			3	3
B	Eselon III	15		10	25
C	Eselon IV	46	266	22	334
JUMLAH PEJABAT		61	266	35	362
D	Pelaksana	66	269	94	429
	TOTAL	127	535	129	791

Adapun demografi pegawai di lingkungan sekretariat kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan tingkat pendidikan adalah dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 1 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 71 orang, setingkat Diploma IV terdapat 1 orang, D3 sebanyak 6 orang, lalu SMU berjumlah 24 orang dan SMP berjumlah 6 orang.

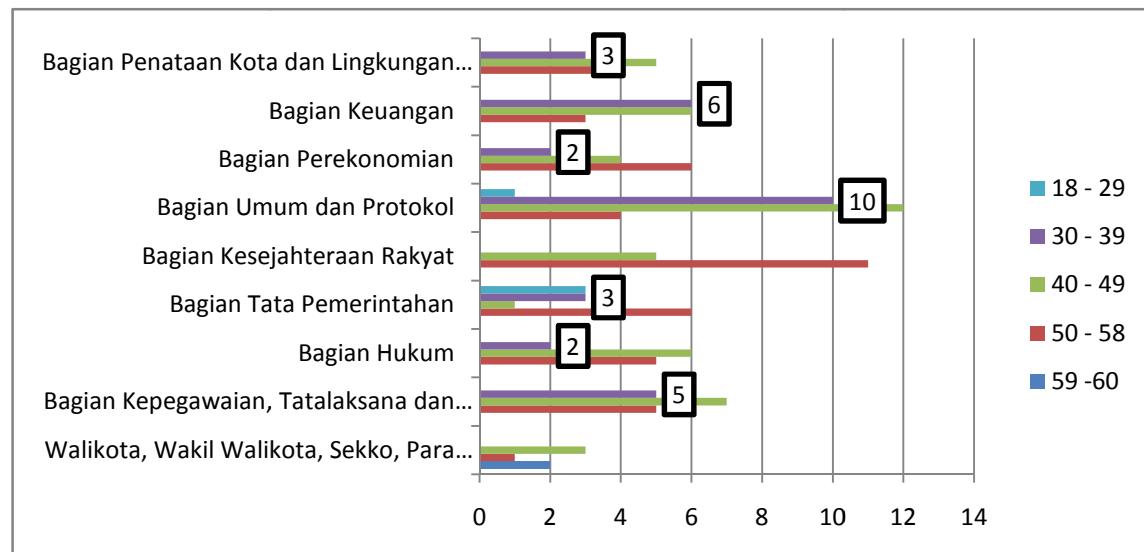
Data jumlah pegawai di lingkungan sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

Diagram 2.1 Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



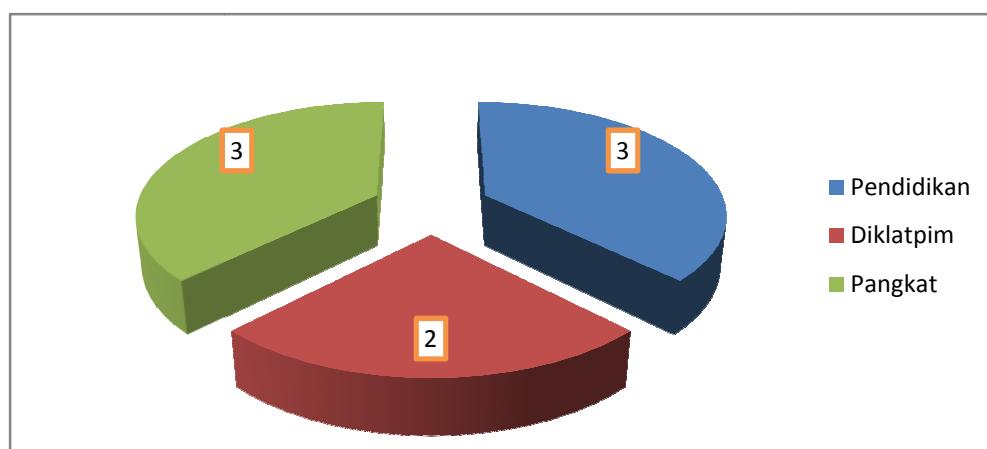
Jumlah pegawai di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Diagram 2.2 Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Usia



Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan tidak hanya dari sisi pendidikan formal namun juga dari sisi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural. Hal ini tercermin dari prosentase kesesuaian jabatan dengan kualifikasi dimana baru sebanyak 38,21% yang telah memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan.

Diagram 2.3 Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat Pejabat Struktural Kota Administrasi Jakarta Barat



4) Sumber Daya Manusia Per Kecamatan

1. Kecamatan Cengkareng

Kecamatan Cengkareng terdiri dari 6 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 512.998 jiwa yang terdiri dari 261.138 jiwa laki-laki dan 251.860 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Cengkareng Berdasarkan
Hasil Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017**

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	CENGKARENG BARAT	37.729	36.847	74.576	55.988
2	DURI KOSAMBI	43.464	42.626	86.090	63.374
3	RAWA BUAYA	36.093	34.636	70.729	52.683
4	KEDAUNG KALI ANGKE	19.090	17.956	37.046	27.605
5	KAPUK	78.888	75.109	153.997	122.663
6	CENGKARENG TIMUR	45.874	44.686	90.560	66.794
KEC. CENGKARENG		261.138	251.860	512.998	379.107

Sumber : Sudin Dukcapil Per November 2018

2. Kecamatan Grogol Petamburan

Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari 7 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Juli 2017 adalah sebanyak 224.040 jiwa yang terdiri dari 112.445 jiwa laki-laki dan 111.595 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol Petamburan Berdasarkan Hasil Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	GROGOL	9.887	9.820	19.707	15.631
2	TANJUNG DUREN UTARA	9.491	10.014	19.505	15.474
3	TOMANG	16.961	16.846	33.807	26.790
4	JELAMBAR	17.074	17.304	34.378	27.170
5	TANJUNG DUREN SELATAN	13.969	14.112	28.081	22.216
6	JELAMBAR BARU	22.016	21.705	43.721	34.191
7	WIJAYA KUSUMA	23.047	21.794	44.841	34.716
KEC. GROGOL PETAMBURAN		112.445	111.595	224.040	176.188

Sumber : Sudin Dukcapil Per November 2018

3. Kecamatan Taman Sari

Kecamatan Taman Sari terdiri dari 8 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 124.656 jiwa yang terdiri dari 62.708 jiwa laki-laki dan 61.948 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kecamatan Taman Sari Berdasarkan Hasil Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	TAMAN SARI	8.405	8.504	16.909	13.676
2	KRUKUT	11.475	11.108	22.583	17.594
3	MAPHAR	9.715	9.513	19.228	15.447
4	TANGKI	7.489	7.732	15.221	12.238
5	MANGGA BESAR	4.349	4.521	8.870	7.271
6	KEAGUNGAN	10.574	9.923	20.497	16.068

7	GLODOK	4.244	4.499	8.743	7.432
8	PINANGSIA	6.457	6.148	12.605	10.010
	KEC.TAMAN SARI	62.708	61.948	124.656	99.736

Sumber : Sudin Dukcapil Per November 2018

4. Kecamatan Tambora

Kecamatan Tambora terdiri dari 11 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 260.384 jiwa yang terdiri dari 133.553 jiwa laki-laki dan 126.831 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kecamatan Tambora Berdasarkan Hasil
Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	TAMBORA	6.189	6.061	12.250	9.573
2	KALI ANYAR	14.781	13.748	28.529	21.486
3	DURI UTARA	11.941	11.455	23.396	17.872
4	TANAH SEREAL	15.373	15.138	30.511	23.840
5	KERENDANG	12.266	11.235	23.501	17.827
6	JEMBATAN BESI	18.321	16.706	35.027	26.324
7	ANGKE	17.837	16.823	34.660	26.586
8	JEMBATAN LIMA	12.742	12.041	24.783	19.110
9	PEKOJAN	13.563	13.290	26.853	21.189
10	ROA MALAKA	1.966	1.983	3.949	3.325
11	DURI SELATAN	8.574	8.351	16.925	13.188
KEC. TAMBORA		133.553	126.831	260.384	200.320

Sumber : Sudin Dukcapil Per November 2018

5. Kecamatan Kebon Jeruk

Kecamatan Kebon Jeruk terdiri dari 7 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 326.590 jiwa yang terdiri dari 164.470 jiwa laki-laki dan 162.120 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kecamatan Kebon Jeruk Berdasarkan Hasil
Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017**

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	KEBON JERUK	29.647	29.283	58.930	44.540
2	SUKABUMI UTARA	22.034	21.726	43.760	32.749
3	SUKABUMI SELATAN	21.560	20.888	42.448	31.528
4	KELAPA DUA	13.439	13.283	26.722	20.184
5	DURI KEPA	33.698	33.691	67.389	52.691
6	KEDOYA UTARA	25.859	25.396	51.255	39.710
7	KEDOYA SELATAN	18.233	17.853	36.086	27.527
KEC. KEBON JERUK		164.470	162.210	326.590	248.929

6. Kecamatan Kalideres

Kecamatan Kalideres terdiri dari 5 Kelurahan berdasarkan hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 392.678 jiwa yang terdiri dari 199.520 jiwa laki-laki dan 193.158 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kecamatan Kalideres Berdasarkan Hasil
Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017**

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	KALIDERES	40.823	39.573	80.396	60.245
2	SEMANAN	40.997	38.820	79.817	58.130
3	TEGAL ALUR	47.380	46.256	93.636	69.276
4	KAMAL	29.770	28.371	58.141	41.945
5	PEGADUNGAN	40.550	40.138	80.688	60.267
KEC. KALIDERES		199.520	193.158	392.678	289.863

Sumber: Sudin Dukcapil Per November 2018

7. Kecamatan Palmerah

Kecamatan Palmerah terdiri dari 6 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 215.619 jiwa yang terdiri dari 109.373 jiwa laki-laki dan 106.246 jiwa perempuan.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kecamatan Palmerah Berdasarkan Hasil Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	PALMERAH	36.205	35.304	71.509	54.380
2	SLIPI	9.888	9.327	19.215	14.721
3	KOTA BAMBU UTARA	14.952	14.381	29.333	21.803
4	JATI PULO	16.951	16.569	33.520	25.314
5	KEMANGGISAN	18.613	18.442	37.055	28.472
6	KOTA BAMBU SELATAN	12.764	12.223	24.987	18.616
KEC. PALMERAH		109.373	106.246	215.619	163.306

8. Kecamatan Kembangan

Kecamatan Kembangan terdiri dari 6 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 269.756 jiwa yang terdiri dari 136.299 jiwa laki-laki dan 133.457 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kecamatan Kembangan Berdasarkan Hasil Konsolidasi Kemendagri 31 Desember 2017

NO	NAMA_KEL	JUMLAH KK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	KEMBANGAN UTARA	30.870	29.748	60.618	44.652
2	MERUYA UTARA	24.647	24.109	48.756	36.831
3	MERUYA SELATAN	17.732	17.527	35.259	26.012

4	SRENGSENG	25.306	24.620	49.926	37.036
5	JOGLO	22.825	22.545	45.370	33.655
6	KEMBANGAN SELATAN	14.919	14.908	29.827	23.007
KEC KEMBANGAN		136.299	133.457	269.756	201.193

2.2.2. Aset Yang Dimiliki

Terdapat aset berupa sarana dan prasarana yang Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi peralatan komputer/telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah :

**Tabel 2.13. Data Aset Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2018**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Luas	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan roda 4	11	11	-	
3.	Komputer/Laptop	47	47		
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	515 M ²			Tanah untuk Rumah Dinas Walikota Jakarta Barat
5.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Walikota Jakarta Barat	46.870 M ²			Tanah untuk Kantor Pemerintahan Walikota Jakarta Barat
6.	Tanah Bangunan Eks Kantor Pemerintah Suku	596 M ²			Tanah untuk Kantor Suku Dinas Dukcapil

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Luas	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
	Dinas Dukcapil				

Sumber: Bagian Umum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

Salah satu indikator kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah dilihat dari program-program strategis sesuai dengan fungsi koordinasi instansi/unit tenis di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat serta tingkat penyerapan anggaran setiap tahunnya.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tahun 2013 – 2017.

**Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tahun 2013 – 2017**

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terlaksananya koordinasi penataan lokasi usaha kaki lima	JB 22 lokasi	22 lokasi	19 lokasi	0	45 lokasi	0	100%	86%	0	204%	0				
2	Terlaksananya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	JB 6.389 RT, 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna	6.409 RT, 580 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna	6.422 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna	6.422 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna	6.473 RT, 585 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna	6.473 RT, 585 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna	100,31%	100,51%	100,51%	101,31%	101,31%				
3	Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyuluhan hukum terpadu	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	100%	100%	100%	0	0				
6	Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	100%	100%	100%	0	0				
7	Penanganan Perkara di Pengadilan tingkat kota/kab	25 perkara	7 perkara	11 perkara	14 perkara	14 perkara	6 perkara	28%	44%	56%	56%	24%				
8	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terlaksananya Keprotokolan Tamu Kota/Kab	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.548	1.230	1.087	1.050	1.050	147%	117%	103%	100%	100%
12	Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani	74 jenis	74 jenis	74 jenis		0	0	100%	100%	100%	100%	100%				
13	Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar	10	12	5	1	7	10	12	5	1	5	100%	100%	100%	100%	71%
14	Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100%	100%	0	0	0

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	17.071.084.900	0	54.864.352.258	36.798.237.921	38.255.886.617	13.960.093.547	0	25.028.244.092	25.509.255.115	30.806.171.033	82		46	69	81	5.296.200.429	4.211.519.372
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	83.915.283.776	0	0	0	0	74.894.797.198	0	0	0	0	89					- 20.978.820.944	- 18.723.699.300
3	Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi	18.310.781.771	0	0	0	0	16.242.819.568	0	0	0	0	89					- 4.577.695.443	- 4.060.704.892
4	Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi	7.030.000.000	0	0	560.807.085	0	6.050.866.780	0	0	546.097.875	0	86			97		- 1.757.500.000	- 1.512.716.695
5	Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan	300.000.000	0	0	0	0	291.483.050	0	0	0	0	97					- 75.000.000	- 72.870.763
6	Program penetapan dan evaluasi kinerja	250.000.000	0	0	0	0	193.619.600	0	0	0	0	77					- 62.500.000	- 48.404.900
7	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	40.000.000	0	0	0	0	34.145.900	0	0	0	0	85					- 10.000.000	- 8.536.475
8	Program koordinasi kebijakan perekonomian	1.250.000.000	2.925.146.093	1.015.363.100	0	0	1.160.277.300	2.037.517.810	853.419.500	0	0	93	40	84			- 312.500.000	- 290.069.325
9	Program koordinasi kebijakan pembangunan	250.000.000	0	0	0	0	248.921.000	0	0	0	0	100					- 62.500.000	- 62.230.250
10	Program keprotokolan daerah	140.000.000	0	0	0	0	131.340.500	0	0	0	0	94					- 35.000.000	- 32.835.125
11	Program peningkatan kinerja Ketentraman dan Keteribatan Umum	3.000.000.000	0	0	0	0	2.807.471.000	0	0	0	0	94					- 750.000.000	- 701.867.750
11	Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	0	499.065.530	2.105.141.470	0	0	0	108.254.070	0	0	0	22					-	-

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
12	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	1.444.996.000	0	0	100.420.000	0	963.370.640	0	0	57.586.000	67			57	25.105.000	14.396.500	
13	Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Sirital	0	3.359.702.425	0	0	0	0	2.879.110.485	0	0	0	86				-	-	-
14	Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota	0	2.136.095.063	0	0	0	0	1.031.506.439	0	0	0	48				-	-	-
15	Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	0	148.742.406	0	0	0	0	23.611.940	0	0	0	16				-	-	-
16	Program Administrasi Umum dan Keruangan Daerah	0	19.414.581.154	0	0	0	0	16.365.586.514	928.758.600	0	0	84	5			-	-	-
17	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	0	449.855.000	0	0	0	0	185.233.000	0	0	0	41				-	-	-
18	Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten	0	843.319.380	264.106.000	0	0	0	154.998.065	96.910.000	0	0	18	37			-	-	-
19	Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten	0	219.876.470	0	0	591.239.696	0	368.722.975	0	0	581.820.725	168			98	147.809.924	145.455.181	
20	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten	0	689.999.590	584.491.000	0	0	0	491.881.444	178.011.000	0	0	71	30			-	-	-
21	Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten	0	2.717.270.560	910.311.700	0	0	0	406.275.200	0	0	0	15				-	-	-
22	Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten	0	849.943.550	2.545.819.500	996.472.500	0	0	336.421.250	1.483.284.750	631.670.000	0	40	58	63		-	-	-
23	Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten	0	149.933.400	277.400.000	0	0	0	136.881.150	61.560.000	0	0	91	22			-	-	-
24	Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten	0	2.509.691.290	251.274.000	0	0	0	1.098.170.086	162.978.000	0	0	44	65			-	-	-
25	Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten	0	4.021.854.712	3.828.377.080	1.036.275.500	1.010.892.000	0	2.456.077.222	928.758.600	749.760.000	933.392.000	61	24	72	74	252.723.000	233.348.000	
26	Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten	0	248.597.390	455.547.900	0	0	0	55.137.860	196.535.100	0	0	22	43			-	-	-
27	Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	0	49.825.905.995	58.291.348.508	7.525.334.825	40.013.008.799	0	42.026.946.900	50.149.598.550	4.923.533.174	29.646.910.133	84	86	65	74	10.003.252.200	7.411.727.533	

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
28	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		49.825.905.995					42.026.946.900						84				0	0
29	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja		74.612.373					52.795.750						71				0	0
30	Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah		24.970.000					24.838.000						99				0	0
31	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.278.490.165					840.742.188						37				0	0
32	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah		98.947.660					63.335.600						64				0	0
33	Program Pendidikan dan Pelatihan		649.127.700					576.358.970						89				0	0
34	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		299.110.500					269.293.500						90				0	0
35	Program Tindakan Kedaruratan Pada Saat Bencana dan Pasca Bencana		249.999.935					113.996.160						46				0	0
36	Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Keteribatan Umum serta Perlindungan Masyarakat		3.074.631.960					2.913.795.000						95				0	0
37	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor		41.314.315.718					17.801.347.431						43				0	0
38	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas		3.923.233.600					373.035.107						10				0	0
39	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		697.976.110					524.578.560						75				0	0
40	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2.084.449.970					1.087.598.030						52				0	0
41	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pembangunan SKPD		79.697.225					36.831.300						46				0	0
42	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD		649.516.008					190.699.465						29				0	0
43	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD		244.926.998					88.898.900						36				0	0
44	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD		50.000.000					0						0				0	0
45	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD		1.774.674.090	1.627.999.565				614.596.454	785.791.500					35	48		-	0	0
46	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah		10.309.014.261					3.788.477.287						37				0	0

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat pada periode 2018 – 2022. Tantangan dan peluang tersebut diantaranya :

2.4.1. Tantangan dan Peluang Eksternal dalam Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

- 1) Tantangan Eksternal
 - a) Masyarakat belum puas terhadap kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - b) Masih belum sempurnanya Peraturan Gubernur tentang tata cara penerimaan kewajiban dari para pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
 - c) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk penempatan jaringan utilitas
- 2) Peluang Eksternal
 - a) Peraturan Perundangan yang mendukung pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - b) Dukungan Pemerintah Provinsi dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - c) Peningkatan jumlah wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat

2.4.2. Tantangan dan Peluang Internal dalam Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

- 1) Tantangan Internal
 - a) Kebutuhan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat belum baik.

- b) Belum meratanya kesadaran Hukum dan HAM serta belum optimalnya pembinaan Kota Peduli HAM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
 - c) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat
 - d) Belum meratanya kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk
 - e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat
 - f) Belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota.
 - g) Belum optimalnya koordinasi bidang pertumbuhan dan perkembangan di Kota Administrasi Jakarta Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik
- 2) Peluang Internal :
- a) TKD yang layak berbasis kinerja mendorong ASN bekerja dengan output dan outcome yang terukur
 - b) Adanya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja sebagai dasar penerapan reward dan punishment yang berimbang untuk mendorong terciptanya keadilan dalam pola karir ASN
 - c) Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
 - d) Sebagian lembaga kemasyarakatan telah memperoleh pemberdayaan pengembangan dan operasional dari Pemprov DKI Jakarta.
 - e) Telah terbangunnya sistem/kanal online sebagai sarana atau sistem pengukuran kinerja pelayanan dan tindak lanjut pengaduan.

- f) Penagihan kewajiban dari para pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kewenangan walikota dan menjadi target KPI.
- g) Adanya kebijakan pengalokasian anggaran yang semakin besar di tingkat Kota serta pemberian kewenangan untuk mengalokasikan pagu wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Barat kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2018-2022. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat

Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat masih harus terus ditingkatkan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum mencapai target.

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Barat berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian Kota Administrasi Jakarta Barat berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Barat. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Barat masih rendah.	Bagian Tata Pemerintahan: Belum optimalnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1.Respon time kehadiran camat dan lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial/kejadian lainnya belum cukup cepat. 2.Pengurus kelembagaan kemasyarakatan belum menyadari dan memahami tugas fungsi lembaganya. 3.Belum optimalnya koordinasi dan monitoring penerimaan daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat secara berkelanjutan. 4.Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. 5.Belum optimalnya koordinasi pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan.
	Bagian Hukum: Belum optimalnya penanganan permasalahan hukum di tingkat Kota Administrasi	1.Belum optimalnya ketersediaan kebutuhan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Jakarta Barat	<p>pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat belum baik.</p> <p>2.Belum meratanya kesadaran Hukum dan HAM serta belum optimalnya pembinaan Kota Peduli HAM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat</p>
	Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik: Belum optimalnya pelayanan kepegawaian, tatalaksana dan pelayanan publik.	<p>1.Belum optimalnya penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>2.Pengukuran kepuasan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat belum terkoordinasi dengan baik.</p> <p>3.Belum tersusunnya SOP di sebagian unit kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>4.Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>5.Belum optimalnya pembinaan administrasi kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>
	Bagian Perekonominan: Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja bidang ekonomi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	<p>1.Belum tercapainya target pembentukan wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>2.Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta.</p> <p>3.Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kepariwisataan, kebudayaan dan ketenagakerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>5. Belum tercapainya peningkatan kualitas udara di Jakarta Barat.</p>
	<p>Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup: Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penataan kota dan lingkungan hidup</p>	<p>1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan.</p> <p>2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penataan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>3. Masih terkendalanya penugihan kewajiban fasos fasum dan sinkronisasi data SIPPT di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kota di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>
	<p>Bagian Umum dan Protokol: Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan umum dan keprotokolan</p>	<p>1. Prasarana dan sarana Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat belum cukup memadai.</p> <p>2. Adanya prasarana dan sarana Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat yang tidak laik pakai.</p> <p>3. Kurangnya sarana pendukung untuk tata</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>kelola arsip.</p> <p>4. Belum optimalnya dukungan kegiatan keprotokolan dan pelayanan jamuan tamu di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>
	<p>Bagian Kesra:</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan rakyat.</p>	<p>1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sosial, pemuda di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan, pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>
	<p>Bagian Keuangan:</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja bidang Keuangan di Kota Administrasi Jakarta Barat</p>	<p>1. Belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota.</p> <p>2. Belum optimalnya koordinasi bidang perpendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Adapun penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report* 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan ahlak. Hal ini berarti Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari

pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakukan dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam substansi sosial kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah dalam mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;

3. Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara Yang Berkarya, Mengabdi, Melayani, Serta Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Kota Dan Warga Secara Efektif, Meritrokratis, Dan Berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat 2018-2022 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat 2018-2022 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Barat mengemban misi nomor 3 yakni ***“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritrokratis, dan berintegritas”***. Untuk mengetahui hambatan dan pendorong Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam Tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi Kepala Daerah	Penghambat	Pendorong
Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan	Belum terbentuknya karakter aparatur sipil negara yang disiplin, berintegritas dan profesionalisme pada sebagian Pegawai.	1. Diterapkannya merit system dalam pola pembinaan kepegawaian mendorong perbaikan karakter

Misi Kepala Daerah	Penghambat	Pendorong
kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas.		<p>ASN</p> <p>2. TKD yang layak berbasis kinerja mendorong ASN bekerja dengan output dan outcome yang terukur</p> <p>3. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja sebagai dasar penerapan reward dan punishment yang berimbang untuk mendorong terciptanya keadilan dalam pola karir ASN.</p>
	Belum optimalnya pola koordinasi perangkat daerah yang secara operasional bertanggungjawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.	<p>1. Kedudukan pimpinan kewilayah mendorong SKPD/UKPD untuk perlu berkoordinasi dalam setiap kegiatannya</p> <p>2. Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah</p>

Misi Kepala Daerah	Penghambat	Pendorong
		dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
	Belum optimalnya pembinaan kelembagaan kemasyarakatan	Sebagian lembaga kemasyarakatan telah memperoleh pembiayaan pengembangan dan operasional dari Pemprov DKI Jakarta.
	Masyarakat belum puas terhadap kinerja pelayan Kota Administrasi Jakarta Barat.	Telah terbangunnya sistem/kanal online sebagai sarana atau sistem pengkuran kinerja pelayanan dan tindak lanjut pengaduan
	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya regulasi dalam penataan ruang parkir bagi bangunan2. Adanya regulasi tentang pengaturan ketertiban umum dan personil penegak aturan

Misi Kepala Daerah	Penghambat	Pendorong
		3. Terprogramnya kegiatan pembentukan wirausaha baru, pembinaan pedagang mikro dan penempatan pada lokasi binaan
	Belum meratanya kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk	Adanya forum pertemuan lintas sektor/ lintas program dan program pembangunan kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan bersama UKPD terkait..
	Masih belum sempurnanya Peraturan Gubernur tentang tata cara penerimaan kewajiban dari para pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kewenangan walikota dan menjadi target KPI	Penagihan kewajiban dari para pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kewenangan walikota dan menjadi target KPI

Misi Kepala Daerah	Penghambat	Pendorong
	petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis	
	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk penempatan jaringan utilitas	Kebijakan pembangunan dari pemda yang memperhitungkan lokasi tetap penempatan jaringan utilitas

3.2.3 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun 23 janji kerja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk kelompok belajar Paket A, B, C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu;
2. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama;
3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru;
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk

- menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha;
5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang;
 6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta;
 7. Membangun pemerintahan yang bersih, modern, melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*);
 8. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95%, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah;
 10. Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti

Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga;

11. Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri;
12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban;
13. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta;
14. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri, dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikan sebagai pusat inovasi konservasi ekologi;
15. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*);
16. Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan

- kebudayaan, antara lain dengan membangun Taman Benyamin Sueb, menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan Film Nasional;
17. Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas;
18. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
19. Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu;
20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbinidu;
21. Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu;
22. Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas;
23. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga

pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

3.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Barat Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

3.3.1. Penataan dan Pengembangan Kawasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, arah kebijakan pengembangan kawasan di wilayah Jakarta Barat meliputi Penataan Kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB), Penataan Kawasan Sentra Flona Semanan, Penataan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi, dan Penataan Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Barat bersama perangkatnya bertugas untuk **mengoordinasikan** pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama *stakeholder* terkait. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penataan Kawasan di 4 (empat) lokasi dimaksud, dijelaskan sebagai berikut :

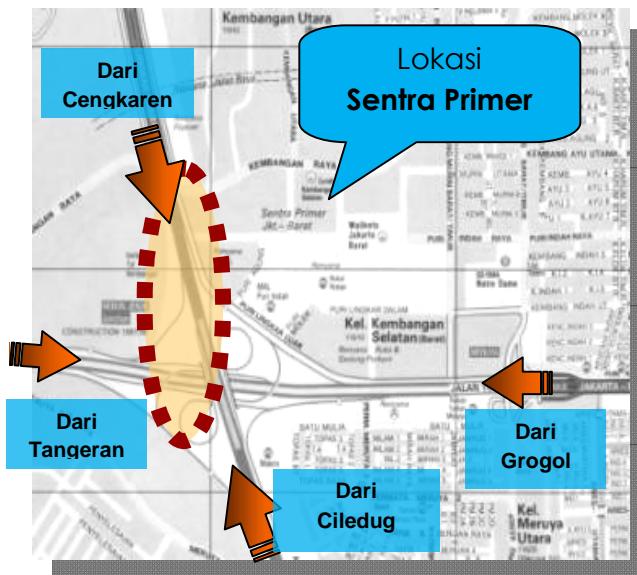
a. Penataan Kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB)

Posisi wilayah Jakarta Barat sangat penting bagi wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena wilayah Jakarta Barat merupakan titik temu (hub) arus dari arah selatan dan utara Jakarta. Wilayah Jakarta Barat memiliki potensi masa depan yang akan menjadi salah satu lokasi bisnis strategis dan favorit, seperti misalnya kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB) yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1629 Tahun 1986 tentang Penguasaan Perencanaan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Kawasan.



Batas-batas wilayah Sentra Primer Barat :

- Sebelah Utara : Jalan Buana Biru Besar 1
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Jakarta – Merak
- Sebelah Barat : Jalan Jakarta Outer Ringroad
- Sebelah Timur : Jalan Puri Kembang Barat/Timur



Sentra Primer Baru Barat (SPBB) merupakan kawasan sentra perdagangan, industri dan perkantoran dengan memiliki luas ± 135 Ha terletak di Kecamatan Kembangan, di mana 57,07 hektar di antaranya

diakuisisi oleh PT. Antilope Madju Puri Indah, dan 15 hektar oleh PT Lippo Karawaci Tbk, separuh konsesi sisanya dimiliki oleh pengembang lainnya.

Sesuai dengan RTRW Provinsi DKI Jakarta, Sentra Primer Baru Barat direncanakan sebagai pusat kegiatan primer, melalui pengembangan

campuran berbagai fungsi kawasan tersebut, yakni kawasan perdagangan, perkotaan, pemukiman dan jasa serta hunian skala kota. Rencana pengembangan kawasan Sentra Primer Baru Barat perlu dukungan program/kegiatan secara terpadu lintas sektor yang meliputi penataan jalan, trotoar terkoneksi antar area satu dengan area lainnya, penataan saluran dan sistem drainase, pencahayaan kota, penataan taman dan jalur, penataan PKL dan penambahan sarana parkir di kawasan tersebut.



Gambar 3.1 Ilustrasi Sentra Primer Baru Barat (SPBB) Sumber: Subanpeko Jakarta Barat, 2017

Tabel 3.3. Inventarisasi Program/Kegiatan Yang Mendukung Penataan Kawasan Sentra Primer Barat

No	Isu/Permasalahan	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD	Keterangan
1	Peningkatan kenyamanan pengguna jalan	Penataan jalan, trotoar di sekitar kawasan	Sudin Bina Marga	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
2	Peningkatan fungsi drainase	Penataan saluran dan sistem drainase di sekitar kawasan	Sudin Sumber Daya Air	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
3	Pengolahan air limbah di sekitar Kantor Walikota Jakarta Barat	Pembangunan Water Treatment	Sudis Sumber Daya Air	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
4	Peningkatan pencahayaan	Pencahayaan kota	Sudin PE	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

No	Isu/Permasalahan	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD	Keterangan
5	Peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan	Pengelolaan kebersihan	Sudin Lingkungan Hidup	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
6	Beautifikasi	Penataan taman dan jalur dan penopongan pohon	Sudis Kehutanan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
7	Rawan PKL liar	Penertiban PKL liar	Satpol PP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
8	PKL belum tertata	Penataan PKL liar	Sudis KUMKMP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
9	Rawan Parkir liar	Penertiban parkir liar	Sudis Perhubungan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
10	Penanganan segera sarana prasarana	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)	Kelurahan Kembangan Selatan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

Sumber : Bagian PKLH Kota Adm. Jakarta Barat

b. Penataan Kawasan Sentra Flona Semanan

Sentra Flora Fauna Semanan hasil pembabasan Tahun Anggaran 2009, dengan fasilitas : parkir, gedung pengelola, Foodcourt, Musholah dengan jumlah kios kurang lebih sebanyak 76 unit.

Permasalahan yang ada di sini adalah lokasi kawasan belum terjangkau dengan angkutan umum, kurangnya penerangan jalan menuju dan dalam kawasan. Sehingga program/kegiatan yang dibutuhkan adalah membuka trayek angkutan umum, perbaikan akses jalan, pemasangan lampu penerangan dan bantuan prasarana PKL (gerobak).



Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sentra Flona Semanan dimulai pada tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014. Kawasan ini

berlokasi di RT 007 RW 03 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres dan memiliki luas ± 29.507 meter persegi atau ± 2,9 Hektar.

Kawasan Sentra Flona Semanan direncanakan sebagai sentra floricultura pusat budidaya tanaman hias. Untuk mendukung rencana tersebut maka perlu dilakukan beberapa program/kegiatan antara lain melalui : peningkatan layanan informasi pusat budidaya, pemasangan paving block, penyediaan toilet umum, perbaikan kios-kios, penyelenggaraan event lomba, festival dan kontes flora fauna, pembukaan trayek menuju lokasi, pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran, pencahayaan kota dan peningkatan kualitas lingkungan disekitar kawasan.



Gambar 3.2. Ilustrasi Kawasan Flona Semanan
Sumber: Subanpeko Jakarta Barat, 2017



Pintu Gerbang



Pedagang Ikan Cupang

Tabel 3.4. Inventarisasi Program/Kegiatan Yang Mendukung Penataan Kawasan Sentra Flona

No	Isu/Permasalahan	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD	Keterangan
1	Belum ada papan nama atau plang lokasi	Pengadaan papan nama lokasi	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
2	Lokasi/Area perlombaan burung berkicau masih tanah	Pemasangan paving block Uk. 20 x 25 M	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
3	Belum ada toilet umum	Penyediaan toilet umum sebanyak 6 unit	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
4	Belum ada papan nama perkomoditi	Pengadaan papan nama untuk blok komoditi	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
5	Kondisi beberapa kios rusak	Perbaikan kios-kios	Sudis KPKP Sudis Cipta Karya	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
6	Belum ada event pameran/ lomba tingkat Walikota	Penyelenggaraan event lomba atau pameran tingkat Walikota	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
7	Penyelenggaraan ajang promosi untuk mendukung pemasaran	Festival sentra flora Semanan	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
8	Lomba pameran ikan hias	Kontes ikan hias dan cupang	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
9	Lomba burung berkicau	Lomba unggas kesayangan	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
10	Pameran tanaman hias dan lomba menu B2SA	Festival sentra flora Semanan	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
11	Belum ada dukungan kesehatan	Sistem dukungan kesehatan dan rujukan	Sudin Kesehatan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
12	Belum ada ruang laktasi	Advokasi pembentukan ruang laktasi	Sudin Kesehatan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
13	Belum semua usaha kuliner tersertifikasi laik sehat	Penyuluhan hygiene sanitasi pangan	Sudin Kesehatan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
14	Belum semua usaha kuliner tersertifikasi laik sehat	Binwasdal tempat usaha kuliner	Sudin Kesehatan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

No	Isu/Permasalahan	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD	Keterangan
15	Kurang tersedianya petunjuk/rambu yang jelas	Pengadaan Rambu wisata/ RPPJ	Sudin Perhubungan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
16	Belum ada transportasi umum menuju lokasi kawasan	Pembukaan trayek menuju Sentra Flona Semanan	Dinas Perhubungan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
17	Peningkatan kenyamanan pengguna jalan	Pemeliharaan jalan di sekitar kawasan	Sudin Bina Marga	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
18	Peningkatan fungsi drainase	Pemeliharaan saluran di sekitar kawasan	Sudin Sumber Daya Air	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
19	Peningkatan pencahayaan	Pencahayaan kota	Sudis Perindutrian dan Energi	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
20	Peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan	Pengelolaan kebersihan	Sudin Lingkungan Hidup	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
21	Belum ada dukungan kesehatan	Pembentukan Pos Kesehatan (bila perlu)	Puskesmas Kec. Kalideres	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
22	Penanganan segera sarana prasarana	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)	Kelurahan Semanan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

Sumber : Bagian PKLH Kota Adm. Jakarta Barat

c. Penataan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi



Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi diresmikan pada 16 Desember Tahun 2007, yang berlokasi Jl. KS Tubun III Dalam RT 001/04 No.39, Kel. Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan

luas lahan 831 m² dan luas bangunan 300 m², dan dikelola oleh Koperasi Pengusaha Ikan Hias Kota Bambu Slipi (Kobapi).

Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias Slipi mempunyai 47 orang tenaga pembudidaya, dengan koleksi berjumlah 6.000 ekor dari berbagai spesies dan tingkatan.

Direncanakan di kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) akan dikembangkan sebagai destinasi wisata dan sarana promosi ikan hias skala lokal, nasional maupun internasional. Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH), perlu dilakukan perbaikan fisik bangunan serta dukungan program/ kegiatan secara terpadu lintas sektor yang meliputi pengadaan rambu wisata/ RPPJ, penggantian lampu PJU berbasis smart system, pemeliharaan jalan dan saluran di sekitar kawasan, serta penangan saranan kebersihan disekitar kawasan.



Gambar 3.3. Ilustrasi Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi

Tabel 3.5. Inventarisasi Program/Kegiatan Yang Mendukung Penataan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi

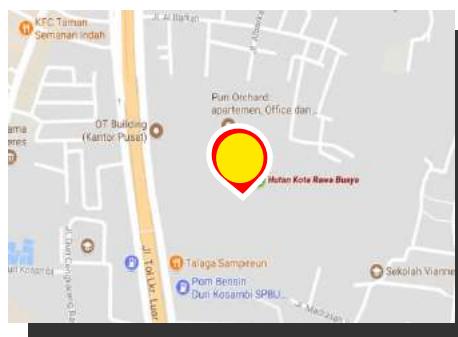
No	Isu/Permasalahan	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD	Keterangan
1	Kurang tersedianya petunjuk/rambu yang jelas	Pengadaan Rambu wisata/ RPPJ	Sudis Perhubungan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
2	Kondisi existing lampu HPS	Penggantian lampu PJU berbasis smart system	Sudis Perindustrian dan Energi	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
3	Peningkatan pencahayaan	Pencahayaan kota	Sudis Perindustrian dan Energi	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

4	Pemanfaatan kurang maksimal oleh kelompok pembudidaya ikan	Peningkatan fungsi SPPIH sebagai pusat budidaya ikan	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
5	Rehab atap SPPIH Slipi	Perbaikan atap yang bocor	Sudis KPKP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
6	Belum ada dukungan kesehatan	Sistem dukungan kesehatan dan rujukan	Suku Dinas Kesehatan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
7		Pembentukan Pos Kesehatan (bila perlu)	Puskesmas Kec. Palmerah	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
8	Peningkatan kenyamanan pengguna jalan	Pemeliharaan jalan di sekitar kawasan	Sudis Bina Marga	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
9	Peningkatan fungsi drainase	Pemeliharaan saluran di sekitar kawasan	Sudis Sumber Daya Air	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
10	Peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan	Pengelolaan kebersihan	Sudis Lingkungan Hidup	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
11	Terdapatnya TPS di dekat lokasi kawasan	Pemindahan TPS yang berada di dekat SPPIH	Sudis Lingkungan Hidup	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
12	Penanganan segera sarana prasarana	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)	Kelurahan Slipi	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

Sumber : Bagian PKLH Kota Adm. Jakarta Barat

d. Penataan Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya

Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya berlokasi di Jalan Albarkah II RT 02 RW 03 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya seluas 1,09 ha ini, memiliki jumlah pohon sebanyak



1.851 pohon dengan tinggi pohon antara 1,5 meter sampai dengan 2 meter, antara lain bisbol, gowok, manggis, jamplang, gandaria, kecapi, kemang, trembesi, gaharu, mahoni, dan lain-lain.

Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya sebagai ruang terbuka hijau akan dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata lingkungan hidup dan sarana edukasi. Rencana pengembangan kawasan Hutan Kota Rawa Buaya dilakukan secara terpadu melalui kegiatan Pengadaan Rambu wisata/ RPPJ, pengadaan papan penunjuk lokasi, penertiban di sekitar kawasan, peningkatan jalan akses menuju lokasi, peningkatan pencahayaan, pemeliharaan saluran dan pengelolaan kebersihan di sekitar kawasan.



Gambar 3.4. Ilustrasi Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya
Sumber: Subanpeko Jakarta Barat, 2017

Tabel 3.6. Inventarisasi Program/Kegiatan Yang Mendukung Penataan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi

No	Isu/Permasalahan	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD	Keterangan
1	Kurang tersedianya petunjuk/rambu yang jelas	Pengadaan Rambu wisata/ RPPJ	Sudis Perhubungan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
2	Papan penunjuk lokasi belum ada	Pengadaan papan penunjuk lokasi	Sudis Perhubungan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
3	Belum dibebaskan dari pemukiman masyarakat kawasan	Penertiban kawasan Hutan Kota Rawa Buaya sebanyak 5,1	Satpol PP	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

No	Isu/Permasalahan	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD	Keterangan
	hutan Rawa Buaya sebanyak 5,1 ha	ha		
4	Jalan akses masuk kurang baik	Peningkatan jalan akses masuk menuju Hutan Kota Rawabuaya	Sudis Bina Marga	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
5	Penerangan kurang di kawasan Hutan Kota Rawa Buaya	Pengadaan lampu penerangan di Hutan Kota Rawabuaya	Sudis Perindustrian dan Energi	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
6	Peningkatan pencahayaan	Pencahayaan kota	Sudis Perindustrian dan Energi	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
7	Pengolahan kompas sampah hutan	Pengadaan sarana pengolahan kompos	Sudis Lingkungan Hidup	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
8	Peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan	Pengelolaan kebersihan	Sudis Lingkungan Hidup	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
9	Sarana prasarana kurang terpelihara	Pemeliharaan sarana dan prasarana Hutan Kota Rawa Buaya	Sudis Kehutanan	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
10	Peningkatan kenyamanan pengguna jalan	Pemeliharaan jalan di sekitar kawasan	Sudis Bina Marga	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
11	Peningkatan fungsi drainase	Pemeliharaan saluran di sekitar kawasan	Sudis Sumber Daya Air	Kawasan Prioritas Tingkat Kota
12	Penanganan segera sarana prasarana	(PPSU)	Kelurahan Rawa Buaya	Kawasan Prioritas Tingkat Kota

Sumber : Bagian PKLH Kota Adm. Jakarta Barat

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Barat, telaahan visi, misi, dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD dapat uraikan beberapa isu-isu strategis. Antara lain:

- 1) Isu partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara

kebersihan lingkungannya. Dalam hal ini masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan.

- 2) Isu ekonomi masyarakat. Dalam hal ini masih perlu di perluas peluang usaha dan kesempatan untuk bekerja dan bimbingan usaha masyarakat. Sehingga perlu melakukan peningkatan koordinasi lintas sektoral.
- 3) Isu pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan, kebudayaan dan olahraga di Kota Administrasi Jakarta Barat. Hal ini terkait dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan kepariwisataan budaya dan olahraga;
- 4) Isu pola koordinasi perangkat daerah yang secara operasional bertanggungjawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang selama ini berjalan belum optimal.
- 5) Isu Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat, yakni belum optimalnya pemberdayaan, pengawasan, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan sehingga perlu adanya upaya Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat RT, RW, LMK, FKMD dan lainnya.
- 6) Isu penanganan permasalahan hukum di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Jumlah perkara hukum yang melibatkan pegawai dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 21 kasus di Pengadilan Negeri (PN) dan 1 (satu) kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 86 permohonan perlindungan hukum.
- 7) Isu penataan dan pengembangan kawasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, arah kebijakan pengembangan kawasan di wilayah Jakarta Barat meliputi Penataan Kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB), Penataan Kawasan Sentra Flona Semanan, Penataan Sentra Promosi dan

Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi, dan Penataan Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Barat bersama perangkatnya bertugas untuk **mengoordinasikan** pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama *stakeholder* terkait.

- 8) Isu penagihan kewajiban kepada pemilik SIPPT. Hal ini terkait dengan kendala dalam penagihan kewajiban berupa fasos fasum sesuai dengan ketentuan dalam SIPPT. Salah satu kendala adalah diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat mutlak dalam proses pemenuhan kewajiban fasos/fasum.
- 9) Isu belum cukup cepatnya waktu respon Camat dan Lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial. Hal ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas Camat dan Lurah sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan data yang ada, dari 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan, terdapat 3 (tiga) Kecamatan dan 14 (empat belas) Kelurahan tidak memiliki rumah dinas. Sementara dari 47 (empat puluh tujuh) Rumah Dinas Camat dan Lurah yang ada, sebanyak 46 (empat puluh enam) Rumah Dinas tidak ditempati oleh Camat dan Lurah (98%). Hal ini terjadi karena Rumah Dinas Camat dan Lurah umumnya dalam kondisi rusak berat maupun ringan yang disebabkan kondisi bangunan yang sudah tua. Rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas oleh Camat dan Lurah dapat memengaruhi tingkat respon Camat dan Lurah dalam menangani permasalahan kewilayahan terutama di luar jam kedinasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

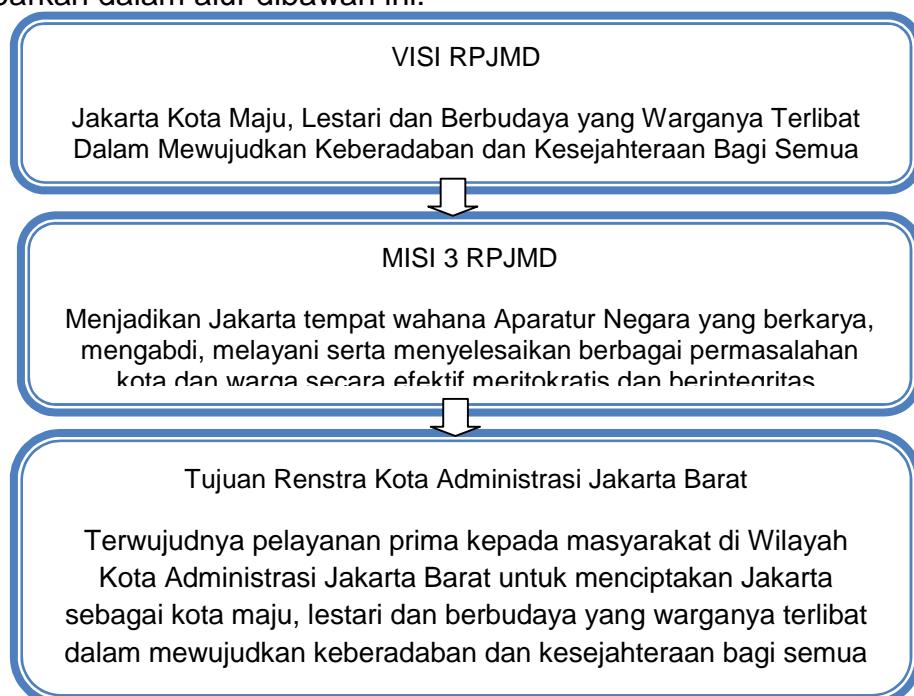
Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Walikota Jakarta Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi Tujuan dan Sasaran untuk jangka menengah.

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan, isu strategis dan menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Sesuai dengan periodisasi dokumen Rencana Strategis yaitu lima tahunan, merupakan gambaran keinginan untuk mewujudkan kondisi yang menjadi tujuan pada masa 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun tujuan renstra Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mendukung visi misi RPJMD adalah:

“Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua”

Keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Visi Misi RPJMD digambarkan dalam alur dibawah ini:



4.2. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018-2022

Sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran strategis Walikota Jakarta Barat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	indeks kepuasan masyarakat	80	83	86	88	88,5	88,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan, sasaran dan indikator, selanjutnya merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Definisi strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Walikota Jakarta Barat untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Teknik analisis SWOT digunakan untuk merumuskan Strategi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan berdasarkan pada tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal. Adapun hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisis SWOT atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

Peluang (O):	Ancaman (T):	
	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Perundangan yang mendukung pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat.Dukungan Pemerintah Provinsi dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Peningkatan jumlah wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat.	<ol style="list-style-type: none">Masyarakat belum puas terhadap kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat.Masih belum sempurnanya Peraturan Gubernur tentang tata cara penerimaan kewajiban dari para pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisBelum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk penempatan jaringan utilitas.
Kekuatan (S):	Alternatif Strategi (S-O):	Alternatif Strategi (S-T):
<ol style="list-style-type: none">TKD yang layak berbasis kinerja mendorong ASN bekerja dengan output dan outcome yang terukurAdanya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja sebagai dasar penerapan reward dan punishment yang berimbang untuk	<ol style="list-style-type: none">Optimalisasi pelayanan kepegawaian, tatalaksana dan pelayanan publik melalui pembinaan kepegawaian, monitoring dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan sistem /kanal online sebagai sarana atau sistem pengukuran kinerja	<ol style="list-style-type: none">Optimalisasi kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pemanfaatan dukungan anggaran untuk pembangunan/rehab kantor lurah, rumah dinas camat dan lurah sehingga

<p>mendorong terciptanya keadilan dalam pola karir ASN</p> <p>3. Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>4. Sebagian lembaga kemasyarakatan telah memperoleh pembiayaan pengembangan dan operasional dari Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>5. Telah terbangunnya sistem/kanal online sebagai sarana atau sistem pengukuran kinerja pelayanan dan tindak lanjut pengaduan.</p> <p>6. Penagihan kewajiban dari para pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kewenangan walikota dan menjadi target KPI.</p> <p>7. Adanya kebijakan pengalokasian anggaran yang semakin besar di tingkat Kota serta pemberian kewenangan untuk mengalokasikan pagu wilayah</p>	<p>pelayanan dan tindak lanjut pengaduan di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>2. Optimalisasi penyelenggaraan kinerja ekonomi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kepariwisataan, kebudayaan dan ketenagakerjaan, dan pembentukan wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>3. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan umum dan keprotokolan melalui pengalokasian dana untuk kegiatan peningkatan prasarana dan sarana kantor dan dukungan kegiatan keprotokolan dan pelayanan jamuan tamu di Kota Administrasi Jakarta Barat</p>	<p>meningkatkan waktu respon camat dan lurah terhadap pelayanan kemasyarakatan; dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang memperoleh pembiayaan dan pengembangan dari Pemprov DKI Jakarta</p> <p>2. Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penataan Kota dan lingkungan hidup melalui pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana kota, dan penagihan kewajiban dan sinkronisasi data SIPPT di Kota Administrasi Jakarta Barat</p>
<p>Weakness (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat belum baik. Belum meratanya kesadaran Hukum dan HAM serta belum optimalnya pembinaan Kota Peduli HAM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat Belum meratanya kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penanganan permasalahan hukum di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pembinaan kesadaran Hukum dan HAM serta Kota Peduli HAM, dan peningkatan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penyelenggaraan kinerja bidang Keuangan di Kota Administrasi Jakarta Barat melalui penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota, dan koordinasi bidang perpendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat

<p>5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>6. Belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota.</p> <p>7. Belum optimalnya koordinasi bidang perbendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik</p>	<p>anak dan Pengendalian Penduduk</p>	
--	---------------------------------------	--

5.1. STRATEGI

Dari analisis SWOT diatas, diperoleh alternatif strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan kepegawaian, tatalaksana dan pelayanan publik melalui pembinaan kepegawaian, monitoring dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan system/kanal online sebagai sarana atau sistem pengukuran kinerja pelayanan dan tindak lanjut pengaduan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Optimalisasi penyelenggaraan kinerja ekonomi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kepariwisataan, kebudayaan dan ketenagakerjaan, dan pembentukan wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan umum dan keprotokolan melalui pengalokasian dana untuk kegiatan peningkatan prasarana dan sarana kantor dan dukungan kegiatan keprotokolan dan pelayanan jamuan tamu di Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Optimalisasi penanganan permasalahan hukum di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pembinaan kesadaran Hukum dan HAM serta Kota Peduli HAM, dan peningkatan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

5. Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk.
6. Optimalisasi kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pemanfaatan dukungan anggaran untuk pembangunan/rehab kantor lurah, rumah dinas camat dan lurah sehingga meningkatkan waktu respon camat dan lurah terhadap pelayanan kemasyarakatan; dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang memperoleh pembiayaan dan pengembangan dari Pemprov DKI Jakarta
7. Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penataan Kota dan lingkungan hidup melalui pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana kota, dan penagihan kewajiban dan sinkronisasi data SIPPT di Kota Administrasi Jakarta Barat.
8. Optimalisasi penyelenggaraan kinerja bidang Keuangan di Kota Administrasi Jakarta Barat melalui penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota, dan koordinasi bidang perpendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang ditetapkan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan waktu respon kehadiran camat dan lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial/kejadian lainnya melalui kegiatan rehab rumah dinas camat dan lurah.
2. Pembinaan pengurus kelembagaan kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas fungsi lembaganya.
3. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan monitoring penerimaan daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat secara berkelanjutan

4. Optimalisasi koordinasi penanggulangan bencana tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan.
6. Optimalisasi ketersediaan kebutuhan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta.
7. Pembinaan kesadaran Hukum dan HAM dan Kota Peduli HAM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
8. Optimalisasi penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.
9. Pengukuran kepuasan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat.
10. Penyusunan SOP di unit kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
11. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
12. Optimalisasi pembinaan administrasi kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.
13. Peningkatan jumlah wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat.
14. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
15. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi di Kota Administrasi Jakarta Barat.
16. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kepariwisataan, kebudayaan dan ketenagakerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
17. Peningkatan kualitas udara di Jakarta Barat.
18. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan.
19. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penataan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
20. Penegihan kewajiban fasos fasum dan sinkronisasi data SIPPT di Kota Administrasi Jakarta Barat.

21. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
22. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kota di Kota Administrasi Jakarta Barat.
23. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat.
24. Peningkatan daya dukung sarana tata kelola arsip.
25. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat.
26. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sosial, pemuda di Kota Administrasi Jakarta Barat.
27. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan, pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat.
28. Optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota.
29. Optimalisasi koordinasi bidang perbendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berikut ini disajikan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Gubernur berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam tabel berikut ini:

TABEL 5.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Optimalisasi kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan waktu respon kehadiran camat dan lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial/kejadian lainnya melalui kegiatan rehab rumah dinas camat dan lurah. 2. Pembinaan pengurus kelembagaan kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas fungsi lembaganya. 3. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan monitoring penerimaan daerah di Kota

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Administrasi Jakarta Barat secara berkelanjutan 4. Optimalisasi koordinasi penanggulangan bencana tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. 5. Optimalisasi koordinasi pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan.
		Optimalisasi penanganan permasalahan hukum di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	1. Optimalisasi ketersediaan kebutuhan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta.</p> <p>2. Pembinaan kesadaran Hukum dan HAM dan Kota Peduli HAM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>
		<p>Optimalisasi pelayanan kepegawaian, tatalaksana dan pelayanan publik.</p>	<p>1. Optimalisasi penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>2. Pengukuran kepuasan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>3. Penyusunan SOP di unit kerja Walikota Kota Administrasi</p>

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Jakarta Barat. 4. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. 5. Optimalisasi pembinaan administrasi kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.
		Optimalisasi penyelenggaraan kinerja bidang ekonomi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.	1. Peningkatan jumlah wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat. 2. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			serta Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Barat. 3. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi di Kota Administrasi Jakarta Barat. 4. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kepariwisataan, kebudayaan dan ketenagakerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penataan kota dan lingkungan hidup di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>	<p>5. Peningkatan kualitas udara di Jakarta Barat</p> <p>1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan.</p> <p>2. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penataan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p> <p>3. Penagihan kewajiban fasos fasum dan sinkronisasi data SIPPT di Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none">4. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Barat.5. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kota di Kota Administrasi Jakarta Barat.6. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan umum dan keprotokolan di Kota Administrasi Jakarta Barat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat.2. Peningkatan daya dukung sarana tata kelola arsip
		Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan rakyat di Kota Administrasi Jakarta Barat.	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat.2. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sosial, pemuda

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			di Kota Administrasi Jakarta Barat. 3. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan, pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat
		Optimalisasi penyelenggaraan kinerja bidang Keuangan di Kota Administrasi Jakarta Barat	1. Optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota. 2. Optimalisasi koordinasi bidang

VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			perbendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Untuk menunjang strategi dan kebijakan, maka dirumuskan program dan kegiatan indikatif sebagai berikut:

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN GENERIK

1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat:
 - a. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - f. Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota;
 - g. Pemeliharaan AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - h. Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - i. Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - j. Penggantian AC Chiller Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - k. Pengadaan IPAL Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - l. Pengadaan IPAL Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;

- m. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
- n. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- o. Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kota Administrasi Jakarta Barat;
- p. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
- q. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- r. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor
- s. Kota Administrasi Jakarta Barat;
- t. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
- u. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
- v. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- w. Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Administrasi Jakarta Barat;
- x. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- y. Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
- z. Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- aa. Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- bb. Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- cc. Perencanaan Rehab Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- dd. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ee. Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ff. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;

- gg. Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- hh. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- jj. Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- kk. Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ll. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- mm. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan; Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- nn. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- oo. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- pp. Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- qq. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- rr. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ss. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- tt. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- uu. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- vv. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;

- ww. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- xx. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- yy. Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- zz. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- aaa. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- bbb. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ccc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ddd. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- eee. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- fff. Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat/Caraka Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ggg. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- hhh. Tersedianya Jasa Pengolahan Air Limbah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- iii. Penggantian Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- jjj. Pemasangan ACP Gedung Kantor Walikota Jakarta Barat;
- kkk. Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- III. Revitalisasi Lantai Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A;

2. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a. Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - f. Pemeliharaan KDO Kelurahan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - g. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - h. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - i. Pemeliharaan KDO Kelurahan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a. Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - f. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;

- g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h. Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Barat;
- i. Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- j. Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Barat;
- l. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- m. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- n. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- o. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- p. Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- q. Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Barat dalam APEKSI;
- r. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- s. Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- t. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- u. Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- v. Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Barat;
- w. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor/Rumah Dinas Kelurahan dan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- x. Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- y. Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- z. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat;
- aa. Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasaan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- bb. Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Adm. Jakarta Barat;
- cc. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- dd. Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ee. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ff. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- gg. Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Adm. Jakarta Barat;
- hh. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ii. Pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- jj. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga;
- kk. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota;
- ll. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat;
- mm. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- nn. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perpendaharaan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- oo. Penataan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat;

- pp. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat;
- qq. Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Barat;
- rr. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- ss. Pelaksanaan Penataan Ruang Kantor Walikota Jakarta Barat;
- tt. Pengelolaan Perpustakaan Kedinasan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- uu. Pelaksanaan Character Building Pegawai Kota Adm. Jakarta Barat;
- vv. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Penyediaan Kerumah tanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Dalam Apeksi;
 - f. Pengadaan Mebeulair 6 Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - g. Penyelenggaraan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - h. Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - i. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan ME Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
 - j. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Kelengkapan Taman Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
 - k. Pemeliharaan Genset Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
 - l. Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
 - m. Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;

- n. Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
 - o. Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - p. Pemeliharaan AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - q. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - r. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - s. Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - t. Penyelengaraan Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - u. Pembangunan Kantor Lurah Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - v. Pembangunan Kantor Lurah Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - w. Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - x. Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- a. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- e. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f. Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- i. Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- j. Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- k. Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- l. Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- m. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- n. Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- o. Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- p. Rehab Total Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- q. Rehab Total Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- r. Pengadaan Meubelair Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- s. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- t. Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat.

6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN/KELURAHAN

- 1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a. Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

- b. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h. Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- i. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat Kelurahan;
- j. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- k. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- l. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- m. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- n. Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- o. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat kecamatan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - g. Pemeliharaan KDO Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - h. Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - i. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - j. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - k. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - l. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - m. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - n. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- o. Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- p. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- q. Pemeliharaan KDO Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- t. Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- u. Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- v. Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- w. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kelurahan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat;
- x. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Secara terperinci, uraian program, kegiatan, indikator beserta pagu indikatif disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan pelayanan Kantor	4 indeks	4 indeks	78.064.088.253	4 indeks	128.863.632.786	4 indeks	122.346.087.719	4 indeks	145.607.632.421	4 indeks	179.273.218.453	4 indeks		Umum dan Protokol	
2	Penyediaan Keruangan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Kebutuhan Keruangan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	457.810.740	4 indeks	550.000.000	4 indeks	550.000.000	4 indeks	550.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol	
3	Pemeliharaan AC kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	1.584.042.642	4 indeks	2.500.000.000	4 indeks	2.500.000.000	4 indeks	2.500.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol	
4	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Pengolahan Air Limbah Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	260.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol							
5	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	1.541.495.822	4 indeks	1.541.495.822	4 indeks	1.541.495.822	4 indeks	1.800.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol	
6	Penggantian AC Chiller Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Penggantian AC Chiller Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	10.000.000.000	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks		Umum dan Protokol	
7	Pengadaan IPAL Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya IPAL Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	5.000.000.000	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks		Umum dan Protokol	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	489.605.888	4 indeks	604.603.995	4 indeks	504.603.995	4 indeks	510.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	319.883.496	4 indeks	319.883.496	4 indeks	400.000.000	4 indeks	400.000.000	4 indeks	550.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	204.516.950	4 indeks	199.516.950	4 indeks	200.000.000	4 indeks	200.000.000	4 indeks	200.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
11	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Sewa Mesin Fotocopy Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	257.400.000	4 indeks		Umum dan Protokol								
12	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	174.030.780	4 indeks	174.030.780	4 indeks	200.000.000	4 indeks	200.000.000	4 indeks	200.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
13	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	162.712.000	4 indeks	165.000.000	4 indeks	190.000.000	4 indeks	190.000.000	4 indeks	199.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
14	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	6.894.861.551	4 indeks	6.894.861.551	4 indeks	6.894.861.551	4 indeks	7.300.000.000	4 indeks	7.500.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
15	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	5.173.758.300	4 indeks	5.173.758.300	4 indeks	6.000.000.000	4 indeks	6.000.000.000	4 indeks	6.500.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	44.110.000	4 indeks	225.155.700	4 indeks		Umum dan Protokol						

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

17	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	11.544.600	4 indeks	15.000.000	4 indeks	30.000.000	4 indeks	30.000.000	4 indeks	30.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
18	Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	1.827.195.000	4 indeks	221.000.000	4 indeks	300.000.000	4 indeks	221.000.000	4 indeks	300.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
19	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	13.566.084.000	4 indeks		Umum dan Protokol								
20	Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkendalinya Hama Gedung Kompleks Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	50.000.000	4 indeks	55.000.000	4 indeks	60.000.000	4 indeks	65.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
21	Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	272.415.583	4 indeks	500.000.000	4 indeks	300.000.000	4 indeks	310.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
22	Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	50.000.000	4 indeks	55.000.000	4 indeks	60.000.000	4 indeks	65.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
23	Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	200.000.000	4 indeks	50.000.000	4 indeks	25.000.000	4 indeks	120.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
24	Perencanaan Rehab Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Perencanaan Rehab Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	50.000.000	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks		Umum dan Protokol

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

25	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	702.133.228	4 indeks	900.000.000	4 indeks	800.000.000	4 indeks	1.000.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
26	Penyediaan Kerumah tanggaan Rumah Dinas Waikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Kerumah tanggaan Rumah Dinas Waikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	10.962.402	4 indeks	30.000.000	4 indeks	20.000.000	4 indeks	50.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
27	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	2.513.274.538	4 indeks	2.695.656.720	4 indeks	3.195.656.720	4 indeks	3.595.656.720	4 indeks		Umum dan Protokol
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	836.982.487	4 indeks	1.000.000.000	4 indeks	836.982.487	4 indeks	836.982.487	4 indeks		Umum dan Protokol
29	Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks	200.000.000	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks		Umum dan Protokol
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	2.178.811.025	4 indeks	2.832.454.332	4 indeks	3.258.148.768	4 indeks	4.235.593.398	4 indeks		Kecamatan
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	36.746.210	4 indeks	47.770.074	4 indeks	62.101.096	4 indeks	80.731.425	4 indeks		Kecamatan
32	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	2.861.865.102	4 indeks	3.720.424.633	4 indeks	4.836.552.022	4 indeks	6.287.517.629	4 indeks	8.173.772.918	4 indeks		Kecamatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

33	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	142.941.130	4 indeks	185.823.469	4 indeks	241.570.509	4 indeks	314.041.662	4 indeks	408.254.161	4 indeks		Kecamatan
34	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	352.653.208	4 indeks	458.449.170	4 indeks	595.983.921	4 indeks	774.779.098	4 indeks	1.007.212.827	4 indeks		Kecamatan
35	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	156.580.166	4 indeks	203.554.215	4 indeks	264.620.480	4 indeks	344.006.624	4 indeks	447.208.612	4 indeks		Kecamatan
36	Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	1.800.630.580	4 indeks	2.340.819.754	4 indeks	3.043.065.680	4 indeks	3.955.985.384	4 indeks	5.142.781.000	4 indeks		Kecamatan
37	Penyediaan Mesin Fotocopy Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Mesin Fotocopy Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	333.290.100	4 indeks	433.277.130	4 indeks	563.260.269	4 indeks	732.238.349	4 indeks	951.909.854	4 indeks		Kecamatan
38	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	46.860.005	4 indeks	60.918.006	4 indeks	79.193.408	4 indeks	102.951.431	4 indeks	133.836.860	4 indeks		Kecamatan
39	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	9.280.700	4 indeks	12.064.910	4 indeks	15.684.383	4 indeks	20.389.697	4 indeks		Kecamatan
40	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	445.484.085	4 indeks	579.129.310	4 indeks	752.868.103	4 indeks	978.728.534	4 indeks	1.272.347.095	4 indeks		Kecamatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

41	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	2.154.779.046	4 indeks	2.801.212.760	4 indeks	3.641.576.588	4 indeks	4.734.049.564	4 indeks	6.154.264.433	4 indeks		Kecamatan
42	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	405.157.534	4 indeks	526.704.794	4 indeks	684.716.232	4 indeks	890.131.102	4 indeks	1.157.170.433	4 indeks		Kecamatan
43	Penyediaan Jasa pengolahan Air Limbah Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa pengolahan Air Limbah Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	2.574.000	4 indeks	3.346.200	4 indeks	4.350.060	4 indeks	5.655.078	4 indeks		Kecamatan
44	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	29.229.310	4 indeks	37.998.103	4 indeks	49.397.533	4 indeks	64.216.794	4 indeks	83.481.832	4 indeks		Kecamatan
45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	6.364.831.524	4 indeks	8.274.280.980	4 indeks	10.756.565.276	4 indeks	13.983.534.858	4 indeks		Kelurahan
46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	983.492.422	4 indeks	1.278.540.150	4 indeks	1.662.102.195	4 indeks	2.160.732.853	4 indeks		Kelurahan
47	Penyedian Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	10.694.040.882	4 indeks	13.902.253.147	4 indeks	18.072.929.091	4 indeks	23.494.807.818	4 indeks	30.543.250.163	4 indeks		Kelurahan
48	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	585.048.292	4 indeks	760.562.779	4 indeks	988.731.613	4 indeks	1.285.351.098	4 indeks	1.670.956.427	4 indeks		Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

49	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	2.982.028.513	4 indeks	3.876.637.067	4 indeks	5.039.628.187	4 indeks	6.551.516.643	4 indeks	8.516.971.636	4 indeks		Kelurahan
50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	1.227.336.318	4 indeks	1.595.537.213	4 indeks	2.074.198.377	4 indeks	2.696.457.891	4 indeks	3.505.395.258	4 indeks		Kelurahan
51	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	16.588.523.468	4 indeks	2.156.508.050	4 indeks	2.803.460.466	4 indeks	3.644.498.605	4 indeks	4.737.848.187	4 indeks		Kelurahan
52	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Sewa Mesin Fotocopy Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	2.269.756.500	4 indeks	2.950.683.450	4 indeks	3.835.888.485	4 indeks	4.986.655.031	4 indeks	6.482.651.540	4 indeks		Kelurahan
53	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	419.930.810	4 indeks	545.910.053	4 indeks	709.683.068	4 indeks	922.587.989	4 indeks	1.199.364.386	4 indeks		Kelurahan
54	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	3.895.249.314	4 indeks	5.063.824.108	4 indeks	6.582.971.340	4 indeks	8.557.862.742	4 indeks		Kelurahan
55	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	2.996.345.626	4 indeks	8.819.961.500	4 indeks	11.465.949.949	4 indeks	14.905.734.934	4 indeks	19.377.455.414	4 indeks		Kelurahan
56	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Mebeulair Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	225.155.700	4 indeks	292.702.410	4 indeks	380.513.133	4 indeks	494.667.072	4 indeks	643.067.194	4 indeks		Kelurahan
57	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	1.440.773.915	4 indeks	1.873.006.090	4 indeks	2.434.907.916	4 indeks	3.165.380.291	4 indeks	4.114.994.379	4 indeks		Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

58	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	22.891.000	4 indeks	29.758.300	4 indeks	38.685.790	4 indeks	50.291.527	4 indeks	65.378.985	4 indeks		Kelurahan
59	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat/ Caraka Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat/ Caraka Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	720.000	4 indeks	936.000	4 indeks	1.216.800	4 indeks	1.581.840	4 indeks	2.056.392	4 indeks		Kelurahan
60	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terisinya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	141.037.380	4 indeks	183.348.594	4 indeks	238.353.172	4 indeks	309.859.123	4 indeks	402.816.861	4 indeks		Kelurahan
61	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Pengolahan Air Limbah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	1.980.000	4 indeks	2.574.000	4 indeks	3.346.200	4 indeks	4.350.060	4 indeks	5.655.078	4 indeks		Kelurahan
62	Penggantian Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Penggantian Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks	1.200.000.000	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks		Umum dan Protokol
63	Pemasangan ACP Gedung Kantor Walikota Jakarta Barat	Tersedianya Pemasangan ACP Gedung Kantor Walikota Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	12.000.000.000	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks		Umum dan Protokol
64	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat/ Caraka Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat/ Caraka Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	1.102.952.906	4 indeks	1.323.543.487	4 indeks	1.588.252.185	4 indeks	1.905.902.622	4 indeks	2.287.083.146	4 indeks		Kecamatan
65	Revitalisasi Lantai Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A	Tersedianya Lantai Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	2.500.000.000	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks	0	4 indeks		Umum dan Protokol

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

66	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	4 indeks	4 indeks	4.546.769.679	4 indeks	10.329.713.940	4 indeks	13.350.618.201	4 indeks	17.061.830.733	4 indeks	22.018.164.158	4 indeks		Umum dan Protokol
67	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	382.336.178	4 indeks	500.000.000	4 indeks	450.000.000	4 indeks	500.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
68	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	283.242.960	4 indeks	283.242.960	4 indeks	283.242.960	4 indeks	283.242.960	4 indeks	300.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
69	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	18.296.300	4 indeks	20.000.000	4 indeks	30.000.000	4 indeks	30.000.000	4 indeks	30.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
70	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	11.002.590	4 indeks	14.303.367	4 indeks	19.594.377	4 indeks	24.172.690	4 indeks	31.424.497	4 indeks		Kecamatan
71	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	183.818.880	4 indeks	238.964.544	4 indeks	310.653.907	4 indeks	403.850.079	4 indeks	525.005.103	4 indeks		Kecamatan
72	Pemeliharaan KDO Kelurahan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya KDO Kelurahan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	203.928.384	4 indeks	265.106.899	4 indeks	344.638.969	4 indeks	448.030.660	4 indeks		Kelurahan
73	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	289.783.780	4 indeks	376.718.914	4 indeks	489.734.588	4 indeks	636.654.964	4 indeks	827.651.454	4 indeks		Kelurahan
74	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	3.760.625.169	4 indeks	4.888.812.720	4 indeks	6.355.456.536	4 indeks	8.262.093.496	4 indeks	10.740.721.545	4 indeks		Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

75	Pemeliharaan KDO Kelurahan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya KDO Kelurahan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	4 indeks	0	4 indeks	3.921.406.873	4 indeks	5.097.828.934	4 indeks	6.627.177.615	4 indeks	8.615.330.899	4 indeks		Kelurahan
76	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	0%	0%	0	85 %	6.052.194.740	86 %	6.591.425.160	87 %	6.939.944.594	88 %	7.376.542.908	88 %		
77		Presentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	229.954.000	100%	252.949.400	100%	278.244.340	100%	306.068.774	100%		Bagian Hukum
78	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Kebutuhan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	229.954.000	100%	252.949.400	100%	278.244.340	100%	306.068.774	100%		Bagian Hukum
79		Presentase Terbinanya Lenmbaga Kemasyarakatan	0%	0%	0	20%	75.000.000	40%	80.000.000	60%	80.000.000	80%	100.000.000	80%		Tata Pemerintahan
80	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	20%	75.000.000	40%	80.000.000	60%	80.000.000	80%	100.000.000	80%		Tata Pemerintahan
81		Presentase Sengketa Hukum	0%	0%	0	100%	28.512.000	100%	31.363.200	100%	34.499.520	100%	37.949.472	100%		Hukum
82	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersesainya Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	28.512.000	100%	31.363.200	100%	34.499.520	100%	37.949.472	100%		Hukum
83		Presentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0 Nilai	0 Nilai	0	94 Nilai		95 Nilai		96 Nilai		97 Nilai		97 Nilai		Hukum
84	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0 Nilai	0 Nilai	0	94 Nilai	86.460.000	95 Nilai	95.136.000	96 Nilai	104.700.000	97 Nilai	115.200.000	97 Nilai		Hukum

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

85	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Meningkatnya dan Terbinanya Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0 Nilai	0 Nilai	0	94 Nilai	11.528.000	95 Nilai	12.684.800	96 Nilai	13.960.000	97 Nilai	15.360.000	97 Nilai		Hukum
86		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0%	0%	0	100%		100%		100%		100%		100%		KTL Yanblik
87	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	21.212.110	100%	21.212.110	100%	21.212.110	100%	21.212.110	100%		KTL Yanblik
88	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	42.613.850	100%	42.613.850	100%	42.613.850	100%	42.613.850	100%		KTL Yanblik
89		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0%	0%	0	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	225.000.000	100%		Perekonomian
90	Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkendali dan Terevaluasinya Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	225.000.000	100%		Perekonomian
91		Jumlah Kawasan yang Tertata	0 Kawasan	0 Kawasan	0	1 Kawasan	25.116.000	1 Kawasan	28.883.400	1 Kawasan	33.215.910	1 Kawasan	38.198.297	4 Kawasan		PKLH
92	Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkendali dan Terevaluasinya Penataaan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat	0 Kawasan	0 Kawasan	0	1 Kawasan	25.116.000	1 Kawasan	28.883.400	1 Kawasan	33.215.910	1 Kawasan	38.198.297	4 Kawasan		PKLH
93		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0 indeks	0 indeks		4 indeks		4 indeks		4 indeks		4 indeks		4 indeks		Umum dan Protokol
94	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggarannya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	0 indeks	0 indeks	0	4 indeks	404.260.000	4 indeks	412.345.000	4 indeks	420.600.000	4 indeks	429.000.000	4 indeks		Umum dan Protokol
95	Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Barat	0 indeks	0 indeks	0	4 indeks	468.000.000	4 indeks	477.360.000	4 indeks	486.900.000	4 indeks	496.650.000	4 indeks		Umum dan Protokol

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

96		Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0%	0%	0	100%	44.850.000	100%	51.577.500	100%	59.313.625	100%	68.211.244	100%		Kesra
97	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	44.850.000	100%	51.577.500	100%	59.313.625	100%	68.211.244	100%		Kesra
98		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0%	0%	0	100%	75.000.000	100%	78.000.000	100%	82.000.000	100%	85.000.000	100%		Kesra
99	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	75.000.000	100%	78.000.000	100%	82.000.000	100%	85.000.000	100%		Kesra
100		Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	0%	0%	0	100%	44.850.000	100%	51.577.500	100%	60.323.625	100%	68.211.244	100%		Kesra
101	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	44.850.000	100%	51.577.500	100%	60.323.625	100%	68.211.244	100%		Kesra
102		Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0%	0%	0	100%	7.680.000	100%	7.680.000	100%	10.240.000	100%	10.240.000	100%		Kesra
103	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Barat	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	7.680.000	100%	7.680.000	100%	10.240.000	100%	10.240.000	100%		Kesra
104		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	0%	0%	0	86 %		87 %		88 %		89 %		89 %		Tata Pemerintahan
105	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat	Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	576.206.413	86 %	635.000.000	87 %	690.000.000	88 %	760.000.000	88 %		Tata Pemerintahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

106	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Barat dalam APEKSI	Terlaksanya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Barat dalam APEKSI	0%	0%	0	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	89 %		Tata Pemerintahan
107	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	671.160.000	86 %	671.160.000	87 %	671.160.000	88 %	671.160.000	88 %		Kesra
108	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	197.977.506	87 %	220.000.000	88 %	240.000.000	89 %	260.000.000	89 %		Tata Pemerintahan
109	Penyusunan Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersusunnya Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	11.200.000	86 %	12.250.000	87 %	13.125.000	88 %	14.000.000	88 %		Tata Pemerintahan
110	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	390.000.000	87 %	429.000.000	88 %	471.900.000	89 %	496.284.238	89 %		Tata Pemerintahan
111	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggarannya Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	45.500.000	87 %	50.000.000	88 %	55.000.000	89 %	60.000.000	89 %		Tata Pemerintahan
112	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor/Rumah Dinas Kelurahan dan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Lingkup Administrasi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	18.000.000	86 %	20.000.000	87 %	22.000.000	88 %	24.000.000	88 %		Tata Pemerintahan
113	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	39.000.000	100%	44.850.000	100%	50.700.000	100%	56.550.000	100%		KTL Yanblik
114	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkendalinya dan Terevaluasinya Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	24.693.880	100%	28.398.880	100%	32.103.880	100%	35.808.880	100%		KTL Yanblik

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

115	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat	Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	24.022.200	100%	26.904.864	100%	30.133.447	100%	33.749.461	100%		KTL Yanblik
116	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasaan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Koordinasi Pengukuran Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	106.400.000	86 %	122.360.000	87 %	138.320.000	88 %	154.280.000	88 %		KTL Yanblik
117	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Adm. Jakarta Barat	Tersusunnya dan Terevaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	56.765.550	100%	55.865.550	100%	55.865.550	100%	55.865.575	100%		KTL Yanblik
118	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	74.976.000	87 %	86.222.400	88 %	99.155.760	89 %	114.029.124	89 %		PKLH
119	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	86.823.000	86 %	99.846.450	87 %	114.823.418	88 %	132.046.930	88 %		PKLH
120	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	110.726.000	86 %	127.334.900	87 %	146.435.135	88 %	168.400.405	88 %		PKLH
121	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Lingkup Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	78.840.000	87 %	78.840.000	88 %	78.840.000	89 %	78.840.000	89 %		Perekonomian
122	Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Adm. Jakarta Barat	Terkendalinya dan Terevaluasinya Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	50.000.000	87 %	60.000.000	88 %	75.000.000	89 %	225.000.000	89 %		Perekonomian

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

123	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	150.000.000	86 %	150.000.000	87 %	150.000.000	88 %	150.000.000	88 %		Perekonomian
124	Pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya STQ/MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	590.770.000	87 %	590.770.000	88 %	590.770.000	89 %	590.770.000	89 %		Kesra
125	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga	0%	0%	0	85 %	75.000.000	86 %	75.000.000	87 %	75.000.000	88 %	75.000.000	88 %		Kesra
126	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	109.890.205	87 %	134.102.830	88 %	135.100.000	89 %	74.100.000	89 %		Kesra
127	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	29.686.600	87 %	29.686.600	88 %	29.686.600	89 %	29.686.600	89 %		Keuangan
128	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	71.500.000	87 %	73.287.500	88 %	73.287.500	89 %	75.119.688	89 %		Keuangan
129	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perpendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Koordinasi Bidang Perpendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	29.250.000	87 %	29.906.250	88 %	29.906.250	89 %	30.653.906	89 %		Keuangan
130	Penataan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat	Tertatinya Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	50.000.000	86 %	60.000.000	87 %	70.000.000	88 %	80.000.000	88 %		Umum dan Protokol

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

131	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	86 %	57.600.000	87 %	79.800.000	88 %	79.800.000	89 %	89.600.000	89 %		Kesra
132	Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	27.625.000	86 %	30.387.500	87 %	33.426.250	88 %	36.768.875	88 %		Tata Pemerintahan
133	Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	32.500.000	100%	35.750.000	100%	39.325.000	100%	43.257.500	100%		Tata Pemerintahan
134	Pelaksanaan Penataan Ruang Kantor Walikota Jakarta Barat	Terlaksananya Penataan Ruang Kantor Walikota Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	0	86 %	109.710.550	87 %	0	88 %	0	88 %		KTL Yanblik
135	Pengelolaan Perpustakaan Kedinasan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Kedinasan Kota Administrasi Jakarta Barat218.676.242	0%	0%	0	85 %	0	86 %	57.150.000	87 %	160.626.242	88 %	900000	88 %		KTL Yanblik
136	Pelaksanaan Character Building Pegawai Kota Adm. Jakarta Barat	Terlaksananya Character Building Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	136.208.426	86 %	136.208.426	87 %	136.208.426	88 %	136.208.426	88 %		KTL Yanblik
137	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkendalinya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	110.500.000	86 %	110.500.000	87 %	110.500.000	88 %	110.500.000	88 %		Keuangan
138	Pelaksanaan Koordinasi Event Kepariwisataan dan Kebudayaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi Event Kepariwisataan dan Kebudayaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	21.160.000	100%	21.160.000	100%	21.160.000	100%	21.160.000	100%		Perekonomian

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

139	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	Perekonomian
140	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	85 %	84.600.000	86 %	84.600.000	87 %	84.600.000	88 %	84.600.000	88 %	84.600.000	88 %	PKLH
141	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	PKLH
142	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	0%	0%	0	86 %	38.203.000	87 %	43.933.450	88 %	43.933.450	89 %	58.101.988	89 %	58.101.988	89 %	PKLH
143	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	0%	0%	0	90 %	197.339.725.00 1	91 %	190.695.557.70 1	92 %	201.051.509.01 1	93 %	398.957.416.91 4	93 %	398.957.416.91 4	93 %	Kelurahan
144	Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	142.147.200.00 0	91 %	142.147.200.00 0	92 %	142.147.200.00 0	93 %	142.147.200.00 0	93 %	142.147.200.00 0	93 %	Kelurahan
145	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	7.868.520.000	91 %	7.868.520.000	92 %	7.868.520.000	93 %	7.868.520.000	93 %	7.868.520.000	93 %	Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

146	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	0 indeks	0 indeks		4 indeks	11.878.650.784	4 indeks	15.442.246.019	4 indeks	20.074.919.824	4 indeks	26.097.395.772	4 indeks		Kelurahan
147	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	1.499.371.224	91 %	1.949.182.591	92 %	2.533.937.369	93 %	3.294.118.579	93 %		Kelurahan
148	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	3.268.006.993	91 %	4.248.409.091	92 %	5.522.931.818	93 %	7.179.811.363	93 %		Kelurahan
149	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	4.200.000.000	91 %	5.600.000.000	92 %	7.000.000.000	93 %	8.400.000.000	93 %		Kelurahan
150	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	5.600.000.000	91 %	6.720.000.000	92 %	7.840.000.000	93 %	8.960.000.000	93 %		Kelurahan
151	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	100 %	15.277.976.000	0 %	0	0 %	0	100 %	185.333.571.200	100 %		Kelurahan
152	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat kelurahan	Terberdayanya Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat kelurahan	0%	0%	0	90 %	5.600.000.000	91 %	6.720.000.000	92 %	8.064.000.000	93 %	9.676.800.000	93 %		Kelurahan
153	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Percentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0%	0%	0	90 %	7.622.002.810	91 %	4.279.722.053	92 %	4.818.923.868	93 %	10.016.703.429	93 %		Kecamatan
154	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	1.682.400.000	91 %	1.682.400.000	92 %	1.682.400.000	93 %	1.682.400.000	93 %		Kecamatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

155	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat		0%	0%	0	90 %	90.250.810	91 %	117.326.053	92 %	152.523.868	93 %	198.281.029	93 %		Kecamatan
156	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90 %	600.000.000	91 %	800.000.000	92 %	1.000.000.000	93 %	1.000.000.000	93 %		Kecamatan
157	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90%	800.000.000	91%	960.000.000	92%	1.120.000.000	93 %	1.280.000.000	93 %		Kecamatan
158	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	0%	0	90%	3.849.352.000	91%	0	92%	0	93 %	4.619.222.400	93 %		Kecamatan
159	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kecamatan	0%	0%	0	90%	600.000.000	91%	720.000.000	92%	864.000.000	93 %	1.036.800.000	93 %		Kecamatan
160	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat	0 indeks	0 indeks	0	4 indeks	438.869.141.61 3	4 indeks	570.529.884.09 7	4 indeks	741.688.849.32 4	4 indeks	964.195.504.11 9	4 indeks		
161	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkendalinya Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	61.559.265.600	4 indeks	80.027.045.280	4 indeks	104.035.158.86 4	4 indeks	135.245.706.52 3	4 indeks		Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

162	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	32.202.839.313	4 indeks	41.863.691.107	4 indeks	54.422.798.439	4 indeks	70.749.637.970	4 indeks		Kelurahan
163	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	10.752.761.980	4 indeks	13.978.590.574	4 indeks	18.172.167.746	4 indeks	23.623.818.069	4 indeks		Kelurahan
164	Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkelolanya Ruang Interaksi Warga di Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	27.498.042.367	4 indeks	35.747.455.077	4 indeks	46.471.691.600	4 indeks	60.413.199.079	4 indeks		Kelurahan
165	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	3.220.323.269	4 indeks	4.186.420.249	4 indeks	5.442.346.324	4 indeks	7.075.050.221	4 indeks		Kelurahan
166	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	302.512.558.80	4 indeks	393.266.326.44	4 indeks	511.246.224.37	4 indeks	664.620.091.69	4 indeks		Kelurahan
167	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	550.666.350	4 indeks	715.866.255	4 indeks	930.626.131	4 indeks	1.209.813.971	4 indeks		Kecamatan
168	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	4 indeks	0 indeks	0	4 indeks	572.683.930	4 indeks	744.489.109	4 indeks	967.835.841	4 indeks	1.258.186.594	4 indeks		Kecamatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

169	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	2.500.000.000	64 gedung	20.000.000.000	72 gedung	37.500.000.000	76 gedung	16.400.000.000	76 gedung		Tata Pemerintahan
170	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	0	64 gedung	0	72 gedung	500.000.000	76 gedung	0	76 gedung		Tata Pemerintahan
171	Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	0	64 gedung	0	72 gedung	20.000.000.000	76 gedung	0	76 gedung		Tata Pemerintahan
172	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	2.500.000.000	64 gedung	2.000.000.000	72 gedung	2.000.000.000	76 gedung	2.000.000.000	76 gedung		Tata Pemerintahan
173	Pengadaan Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Meubelair Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	0	64 gedung	0	72 gedung	600.000.000	76 gedung	0	76 gedung		Tata Pemerintahan
174	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Meubelair Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	0	64 gedung	3.000.000.000	72 gedung	2.400.000.000	76 gedung	2.400.000.000	76 gedung		Tata Pemerintahan
175	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Meubelair Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	0	64 gedung	0	72 gedung	900.000.000	76 gedung	0	76 gedung		Tata Pemerintahan
176	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	0	64 gedung	15.000.000.000	72 gedung	12.000.000.000	76 gedung	12.000.000.000	76 gedung		Tata Pemerintahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

177	Pembangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat		51 gedung	0 gedung	0	53 gedung	0	64 gedung	0	72 gedung	0	76 gedung	0	76 gedung		Tata Pemerintahan
178	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahann Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	6 gedung	0 gedung	0	6 gedung	1.250.000.000	11 gedung	60.000.000.000	11 gedung	1.900.000.000	11 gedung	0	11 gedung		Tata Pemerintahan
179	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terencananya Rehab Total Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	6 gedung	0 gedung	0	6 gedung	750.000.000	11 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung		Tata Pemerintahan
180	Rehab Total Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Rehab Total Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	6 gedung	0 gedung	0	6 gedung	0	11 gedung	30.000.000.000	11 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung		Tata Pemerintahan
181	Rehab Total Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Rehab Total Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	6 gedung	0 gedung	0	6 gedung	0	11 gedung	30.000.000.000	11 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung		Tata Pemerintahan
182	Pengadaan Meubelair Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Meubelair Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	6 gedung	0 gedung	0	6 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung	1.000.000.000	11 gedung	0	11 gedung		Tata Pemerintahan
183	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Meubelair Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	6 gedung	0 gedung	0	6 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung	900.000.000	11 gedung	0	11 gedung		Tata Pemerintahan
184	Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terencananya Rehab Total Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	6 gedung	0 gedung	0	6 gedung	500.000.000	11 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung	0	11 gedung		Tata Pemerintahan
185	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kota Administrasi	0%	85%	79.682.083.525	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		KTL dan Yanlik

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

186	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	836.982.487	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
187	Penyediaan Keruangan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Keruangan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	457.810.740	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
188	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	382.336.178	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
189	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat	Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	574.790.462	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Tata Pemerintahan
190	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Dalam Apeksi	Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Dalam Apeksi	0%	85%	55.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Tata Pemerintahan
191	Pengadaan Mebelair 6 Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Mebelair 6 Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	3.950.892.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Tata Pemerintahan
192	Penyelenggaraan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	324.120.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
193	Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	624.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
194	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan ME Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan ME Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	0%	85%	2.413.274.538	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

195	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Kelengkapan Taman Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Kelengkapan Taman Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	0%	85%	706.808.228	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
196	Pemeliharaan Genset Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	Tersedianya Pemeliharaan Genset Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	0%	85%	272.415.583	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
197	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	Terpeliharanya Lift Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	0%	85%	1.541.495.822	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
198	Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	Terpeliharanya Rumah Dinas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	0%	85%	16.598.964	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
199	Penyediaan Kerumah tanggaan Rumah Dinas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	Tersedianya Kebutuhan Kerumah tanggaan Rumah Dinas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	0%	85%	10.962.402	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
200	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terurusnya Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	77.949.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Hukum
201	Pemeliharaan AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpilihannya AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	1.584.042.642	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol
202	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	46.200.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Kesra
203	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	489.605.888	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Umum dan Protokol

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

204	Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	45.200.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Tata Pemerintahan
205	Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	216.150.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Tata Pemerintahan
206	Pembangunan Kantor Lurah Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat	Terbangunnya Kantor Lurah Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat	0%	85%	7.528.217.209	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	85%		Tata Pemerintahan
207	Pembangunan Kantor Lurah Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat	Terbangunnya Kantor Lurah Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	7.527.231.382	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Tata Pemerintahan
208	Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Lahan Kantor Lurah Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	25.000.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Tata Pemerintahan
209	Pengadaan Lahan Kantor Lurah Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Lahan Kantor Lurah Jembatan Lima Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	25.000.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Tata Pemerintahan
210	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0 %	80 %	69.423.700	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %		Kecamatan
211	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0 %	80 %	423.589.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %		Kecamatan
212	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	1.682.400.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kecamatan
213	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat		100 %	100 %	440.526.100	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kecamatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

214	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat		100 %	100 %	1.676.008.481	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kecamatan
215	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	769.127.109	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kecamatan
216	Pemeliharaan KDO Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya KDO Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	156.867.988	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kecamatan
217	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Kebutuhan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	232.701.968.31 1	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kecamatan
218	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	9.132.049.168	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
219	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	8.271.355.369	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
220	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerasan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkendalinya Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerasan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	47.353.281.231	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
221	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	erlaksananya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	24.721.498.257	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

222	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	7.861.110.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
223	Penyelenggaraan Keteribatan Umum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Keteribatan Umum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	2.477.171.745	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
224	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Kebutuhan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	2.513.851.533	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
225	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	6.784.585.769	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
226	Pemeliharaan KDO Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya KDO Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	3.016.466.825	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
227	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	4.896.024.249	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	756.532.633	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
229	Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Meningkatkan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	142.147.200.00 0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
230	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	1.153.362.480	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

231	Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terkelolanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	21.152.340.282	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
232	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamaman dan Pemakaman Kelurahan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamaman dan Pemakaman Kelurahan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	127.303.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kelurahan
233	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	100 %	100 %	28.266.316	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		Kecamatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Tabel Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Meningkatnya kualitas kepuasan penyelenggaran pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	indeks kepuasan masyarakat	Program peningkatan dan pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan layanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Index 1 = 0-25%, Index 2 = >25% - 50% - 75%, dan Index 4 = > 75%-100%	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index
				Program pengelolaan kendaraan operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks kepuasan layanan kendaraan operasional berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Index 1 = 0-25%, Index 2 = >25% - 50% - 75%, dan Index 4 = > 75%-100%	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index
				Program Peningkatan penyelenggaraan	Persentase Penanganan Perkara tingkat	Jumlah Perkara yang sedang ditangani dibagi Jumlah Perkara yang masuk x 100 %	0	100	100	100	100

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
							2018	2019	2020	2021	2022
			Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat							
					Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT yang terbina dibagi Jumlah RT x 100 % b. Jumlah RW yang terbina dibagi Jumlah RW x 100 % c. Jumlah LMK yang terbina dibagi Jumlah LMK x 100 % Persentase RT yang terbina + Persentase RW yang terbina + Persentase LMK yang terbina dibagi 3	0	20	40	60	80
					Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah sengketa yang di mediasi dibagi Jumlah sengketa yang masuk di tahun berjalan x 100 %	0	100	100	100	100
					Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai Kota Peduli HAM > 75 / Tahun	0	94	95	96	97
					Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	Capaian KPI Walikota per Tahun > 80 %	0	100	100	100	100
					Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	Jumlah Wirausaha Baru dibagi Target Jumlah Wirausaha Baru x 100 %	0	100	100	100	100
					Jumlah Kawasan yang Tertata	Jumlah Kawasan yang Tertata	0	1	1	1	1
					Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Total Nilai indeks dibagi jumlah acara (Quesioner)	0	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index
					Koordinasi Pelaksanaan Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kota	0	100	100	100	100

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
							2018	2019	2020	2021	2022
					Sehat	Sehat					
					Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0	100	100	100	100
					Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kota Peduli Anak	0	100	100	100	100
					Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS	0	100	100	100	100
					Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	Jumlah Persentase Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Kegiatan x 100 %	0	85	86	87	88
				Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Persentase Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Kegiatan x 100 %	0	90	91	92	93
					Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Persentase Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Kegiatan x 100 %	0	90	91	92	93
				Program peningkatan pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Kelurahan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan PPSU, Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA, Ketertiban Umum, dll	0	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
							2018	2019	2020	2021	2022
				Barat	Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan : Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kota dibagi Kabupaten : Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan					
					Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang standar sesuai dengan aturan yang berlaku. 2018 : 2 Kantor Lurah & 0 Rumah Dinas Lurah 2019 : 0 Kantor Lurah & 0 Rumah Dinas Lurah 2020 : 3 Kantor Lurah & 8 Rumah Dinas Lurah 2021 : 0 Kantor Lurah & 8 Rumah Dinas Lurah 2022 : 0 Kantor Lurah & 4 Rumah Dinas Lurah	0	53	64	72	76
					Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang standar sesuai dengan aturan yang berlaku 2018 : 0 Kantor Camat & 0 Rumah Dinas Camat 2019 : 0 Kantor Camat & 0 Rumah Dinas Camat 2020 : 2 Kantor Camat & 3 Rumah Dinas Camat 2021 : 0 Kantor Camat & 0 Rumah Dinas Camat 2022 : 0 Kantor Camat & 0 Rumah Dinas Camat	0	6	11	11	11
					Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	85	0	0	0	0

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
							2018	2019	2020	2021	2022
					Pelayanan Kota Administrasi						
					Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	80	0	0	0	0

BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan dokumen kerja Pimpinan Daerah beserta jajarannya dalam masa kerja lima tahun. Selanjutnya Renstrada ini diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut sebagai usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pembangunan daerah, maka disusunlah rencana strategis SKPD. Hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi diatas adalah beberapa instrument yang antara lain organisasi perangkat dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga implementasi Renstra dapat mencapai hasil yang optimal selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Oleh sebab itu, Rencana Kerja harus disesuaikan dengan Renstra ini dan Renstra SKPD harus mengacu kepada RPJMD 5 (lima) tahun berjalan.

Renstra berfungsi sebagai pemberi arah bagi pelaksanaan pembangunan yang bertahap dan berkelanjutan, untuk itulah Renstra disusun berdasarkan RPJMD dan memperhatikan Tupoksi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Selain sebagai pemberi arah Renstra juga menunjukkan bagaimana cara mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan berdasarkan visi dan misinya.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2018-2022 pada dasarnya merupakan dokumen rencana tindakan (action plan) atau program pembangunan daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat yang terpadu dan berkelanjutan secara bertahap selama lima tahun ke depan, sebagai penjabaran pragmatis dari visi, misi rencana strategis dan arah kebijakan, serta program Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat yang berdasarkan pada konsisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang.

Berhasilnya implementasi Renstra sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh perangkat pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat serta dukungan masyarakat. Untuk itu, seluruh perangkat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu menjalankan tugas dengan lurus untuk mencapai cita-cita yang telah dijabarkan dalam Renstra ini, yaitu dengan bekerja keras dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing unit kerja, yang selanjutnya menjadi satu tujuan strategis Kota Administrasi Jakarta Barat.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

H. Rustam Effendi
NIP 196010131983121001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN